

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha ESA sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *"Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun."*

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan, semoga LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 25 Maret 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	1
c. Jumlah Penduduk.....	4
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.....	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	11
a. Permasalahan strategis daerah.....	11
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	12
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	14
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	25
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	72
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH....	77
3.1. Capaian Kinerja Makro	77
3.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	82
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	83
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	134
c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	146

3.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	149
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	149
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	153
c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	156
d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja	184
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai	194
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	201
6.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah	201
3.1.1. Target Kinerja	201
3.1.2. Realisasi.....	202
6.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah	206
3.2.1. Target Kinerja	206
3.2.2. Realisasi.....	206
6.3. Permasalahan dan Kendala	206
6.4. Saran dan Tindaklanjut.....	206
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	207
10.1. Urusan Pendidikan	207
7.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	207
7.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	207
7.1.3. Realisasi.....	208
7.1.4. Alokasi anggaran	209
7.1.5. Dukungan Personil.....	209
7.1.6. Permasalahan dan Solusi	211
10.2. Urusan Kesehatan.....	212
7.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	212
7.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	212
7.2.3. Realisasi.....	215
7.2.4. Alokasi Anggaran.....	218

7.2.5.	Dukungan Personil.....	218
7.2.6.	Permasalahan dan Solusi	219
10.3.	Urusan Pekerjaan Umum	220
7.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	220
7.3.2.	Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	221
7.3.3.	Realisasi.....	221
7.3.4.	Alokasi Anggaran.....	222
7.3.5.	Dukungan Personil.....	222
7.3.6.	Permasalahan dan Solusi.....	222
10.4.	Urusan Perumahan Rakyat.....	223
7.4.1.	Jenis pelayanan Dasar.....	223
7.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	223
4.4.1.	Realisasi.....	224
7.4.3.	Alokasi Anggaran.....	225
7.4.4.	Dukungan Personil.....	225
7.4.5.	Permasalahan dan Solusi	225
10.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	226
7.5.1.	Jenis pelayanan Dasar.....	226
7.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	227
7.5.3.	Realisasi.....	228
7.5.4.	Alokasi Anggaran.....	230
7.5.5.	Dukungan Personil.....	230
7.5.6.	Permasalahan dan Solusi	230
10.6.	Urusan Sosial	231
7.6.1.	Jenis pelayanan Dasar.....	231
7.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	231
7.6.3.	Realisasi.....	232
7.6.4.	Alokasi Anggaran.....	234
7.6.5.	Dukungan Personil.....	234

7.6.6. Permasalahan dan Solusi	234
10.7. Program dan Kegiatan	235
BAB V PENUTUP	242

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen	2
Tabel 1. 2 Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen.....	4
Tabel 1. 3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	4
Tabel 1. 4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen	6
Tabel 1. 5 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021	7
Tabel 1. 6 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	10
Tabel 1. 7 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021.....	26
Tabel 1. 8 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	62
Tabel 1. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	70
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.....	77
Tabel 2. 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen	80
Tabel 2. 3 Capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021	83
Tabel 2. 4 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021	134
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2021	146
Tabel 2. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	150
Tabel 2. 7 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2021	152
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2021 Terhadap RPJMD	153
Tabel 2. 9 Analisis Efisiensi Anggaran Yang Mendukung IKU.....	195
Tabel 3. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2021.....	205
Tabel 4. 1 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021	207
Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021.....	208
Tabel 4. 3 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2021.....	212
Tabel 4. 4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2021	215
Tabel 4. 5 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021	221
Tabel 4. 6 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	221
Tabel 4. 7 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021	224

Tabel 4. 8 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021	224
Tabel 4. 9 Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2021	227
Tabel 4. 10 Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2021.....	228
Tabel 4. 11 Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021.....	231
Tabel 4. 12 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen.....	2
Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen	3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021	78
Grafik 2. 2 Angka Pengangguran Kabupaten Kebumen	81
Grafik 2. 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen mendasari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

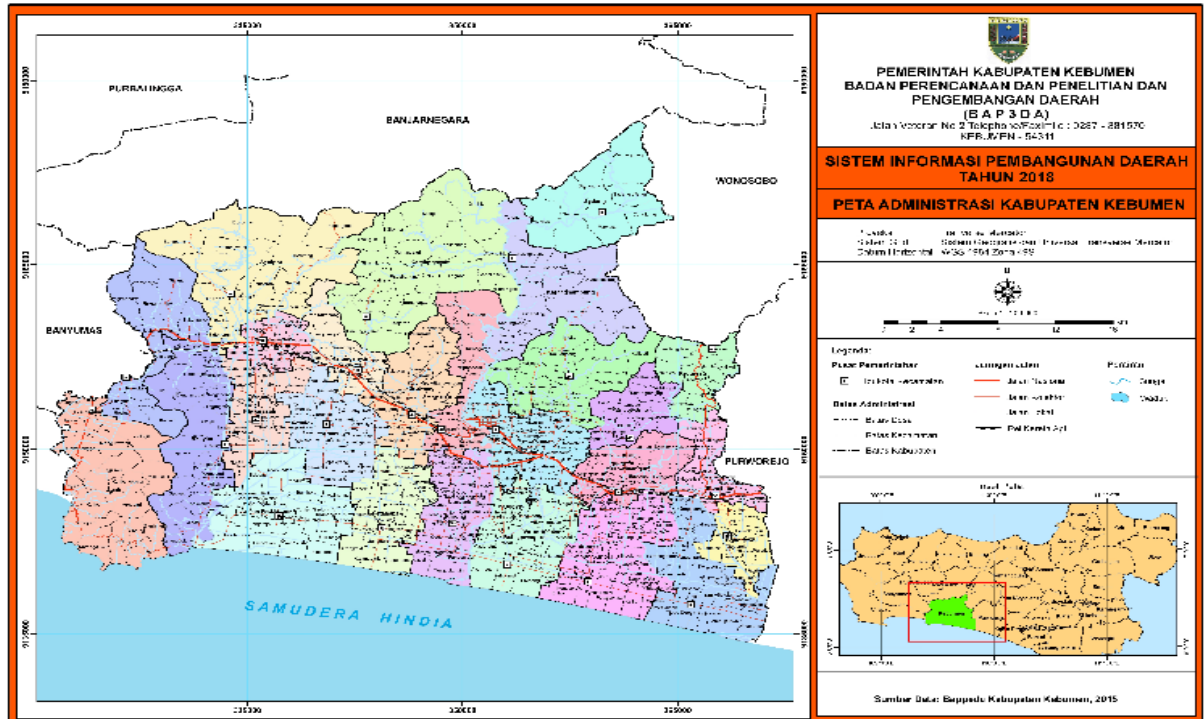
b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

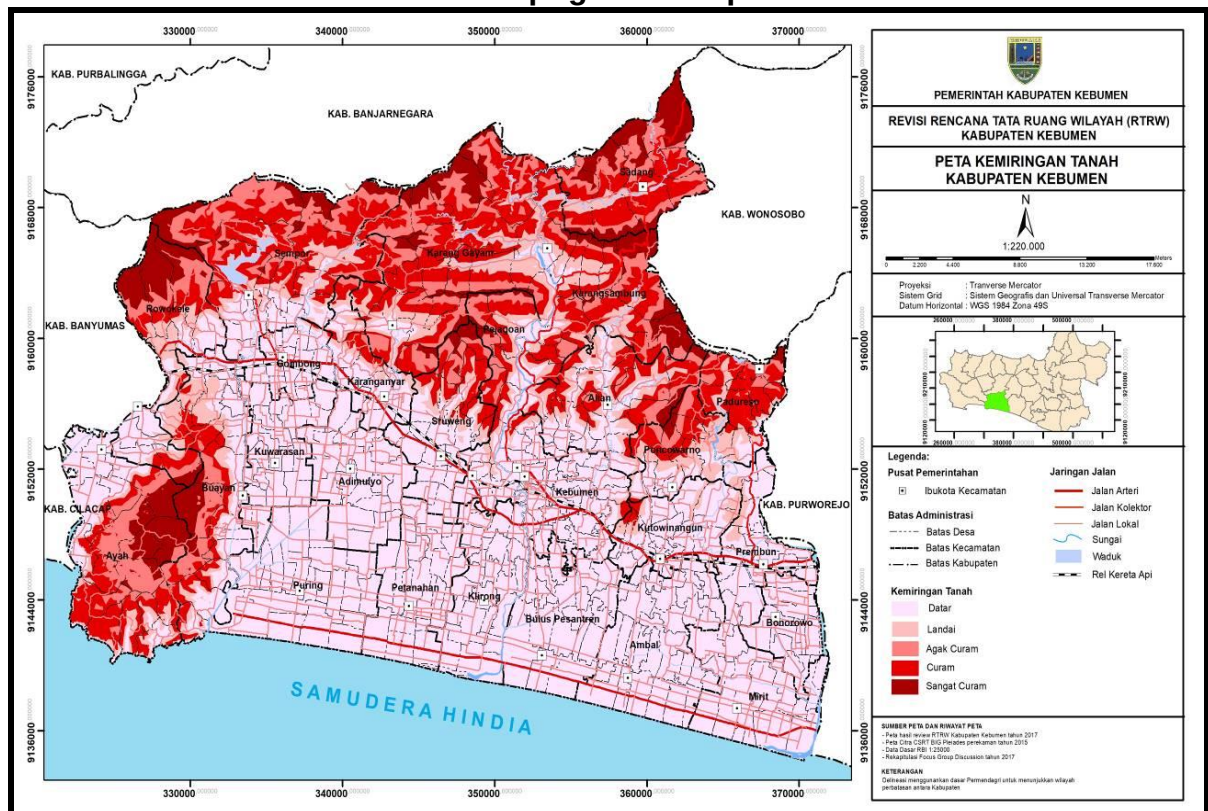
No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2021

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen



Sumber: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2021

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah.

Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombang, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.405.644 jiwa, tumbuh sebesar 0,40% dari tahun 2020. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.565 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 692.079 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ayah	33.656	32.631	66.287
2	Buayan	34.594	33.148	67.742
3	Puring	33.039	32.178	65.217
4	Petanahan	31.108	30.510	61.618
5	Klirong	33.111	32.282	65.393
6	Buluspesantren	30.793	29.649	60.442
7	Ambal	33.048	31.661	64.709
8	Mirit	27.983	27.073	55.056
9	Prembun	14.825	14.718	29.543
10	Kutowinangun	25.186	24.298	49.484

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	Alian	35.412	33.808	69.220
12	Kebumen	68.239	66.412	134.651
13	Pejagoan	28.742	27.551	56.293
14	Sruweng	32.057	31.353	63.410
15	Adimulyo	19.148	19.245	38.393
16	Kuwarasan	26.651	25.666	52.317
17	Rowokele	26.693	26.118	52.811
18	Sempor	36.426	35.167	71.593
19	Gombong	25.298	25.376	50.674
20	Karanganyar	19.310	18.981	38.291
21	Karanggayam	31.311	30.020	61.331
22	Sadang	12.196	11.423	23.619
23	Bonorowo	11.388	10.963	22.351
24	Padureso	8.636	8.420	17.056
25	Poncowarno	9.728	9.394	19.122
26	Karangsambung	24.987	24.034	49.021
	Jumlah	713.565	692.079	1.405.644

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 berkisar antara 103%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.651 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 17.056 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen

Tabel 1. 4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1930	7127

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat; 17 (tujuh belas) Dinas, 4 (empat) Badan; dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 5 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah	80	58	138
2.	Staf Ahli Bupati	1	1	2
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	31	20	51
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	4	22
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27	23	50
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	36	11	47
7.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23	13	36
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	10	18
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	24	11	35
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	46	10	56
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	12	31
12.	Dinas Kesehatan	534	1435	1969
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	10	31
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179	28	207
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	18	33
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	14	26
17.	Dinas Pendidikan	2902	1803	4705
18.	Dinas Perhubungan	34	7	41
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80	18	98
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	104	105	209
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39	15	54
22.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat	16	2	18
23.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan	36	8	44

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
	Sampah Wilayah Timur			
24.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	12	31
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31	17	48
26.	Inspektorat	26	19	45
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15	6	21
28.	Kecamatan Adimulyo	12	4	16
29.	Kecamatan Alian	11	1	12
30.	Kecamatan Ambal	10	4	14
31.	Kecamatan Ayah	11	6	17
32.	Kecamatan Bonorowo	11	3	14
33.	Kecamatan Buayan	14		14
34.	Kecamatan Buluspesantren	7	6	13
35.	Kecamatan Gombang	9	5	14
36.	Kecamatan Karanganyar	10	4	14
37.	Kecamatan Karanggayam	12	1	13
38.	Kecamatan Karangsambung	11	6	17
39.	Kecamatan Kebumen	6	5	11
40.	Kecamatan Klirong	9	2	11
41.	Kecamatan Kutowinangun	15	3	18
42.	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
43.	Kecamatan Mirit	9	6	15
44.	Kecamatan Padureso	8	2	10
45.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
46.	Kecamatan Petanahan	10	7	17
47.	Kecamatan Poncowarno	12	3	15
48.	Kecamatan Prembun	6	11	17
49.	Kecamatan Puring	16	2	18
50.	Kecamatan Rowokele	9	5	14
51.	Kecamatan Sadang	9	3	12
52.	Kecamatan Sempor	13	3	16
53.	Kecamatan Sruweng	11	2	13
54.	Kelurahan Bumirejo	2	3	5
55.	Kelurahan Gombang	5	1	6
56.	Kelurahan Jatiluhur	3	4	7
57.	Kelurahan Karanganyar	7	1	8
58.	Kelurahan Kebumen	2	4	6
59.	Kelurahan Panjatan	6	1	7
60.	Kelurahan Panjer	4	2	6
61.	Kelurahan Plarangan	4	3	7
62.	Kelurahan Selang	2	3	5
63.	Kelurahan Tamanwinangun	4		4
64.	Kelurahan Wonokriyo	4	1	5
65.	Sanggar Kegiatan Belajar	5	4	9

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	46	3	49
67.	Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	23	7	30
68.	RSUD Soedirman	174	262	436
69.	RSUD Prembun	47	84	131
	JUMLAH	4990	4174	9164

Sumber : BKPSDM Kab. Kebumen, 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami trend atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu. Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikut ini disajikan tabel data tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1. 6 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
I	BELANJA DAERAH	2.958.061.909.000	2.779.173.955.849	93,95
	BELANJA OPERASI	2.049.740.910.000	1.901.995.140.459	92,79
	Belanja Pegawai	1.213.347.347.000	1.141.262.313.703	94,06
	Belanja Barang dan Jasa	733.937.101.000	666.288.730.026	90,78
	Belanja Subsidi	500.000.000	484.527.400	96,91
	Belanja Hibah	78.200.274.000	72.480.669.601	92,69
	Belanja Bantuan Sosial	23.756.188.000	21.478.899.729	90,41
	BELANJA MODAL	291.188.892.000	266.087.980.340	91,38
	Belanja Modal Tanah	4.911.216.000	4.062.715.011	82,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.203.064.000	112.060.933.500	91,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.461.739.000	44.827.545.305	92,50
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.679.178.000	97.454.097.763	90,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.933.695.000	7.682.688.761	96,84
	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.216.770.000	545.318.400	8,77
	Belanja Tidak Terduga	6.216.770.000	545.318.400	8,77
	BELANJA TRANSFER	610.915.337.000	610.545.516.650	99,94
	Belanja Bagi Hasil	14.019.972.000	13.862.929.650	98,88
	Belanja Bantuan Keuangan	596.895.365.000	596.682.587.000	99,96
II	PENDAPATAN	2.741.711.600.000,00	2.832.170.709.948,00	103,30%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pajak Daerah	101.551.500.000,00	112.474.854.190,00	110,76%
	Retribusi Daerah	29.520.683.000,00	23.653.160.977,00	80,12%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.859.000,00	16.552.860.815,00	100%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	251.349.778.000,00	319.471.531.400,00	127,10%
	JUMLAH (I)	398.974.820.000,00	472.152.407.382,00	118,34%
	PENDAPATAN TRANSFER			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.051.701.194.000,00	2.059.293.466.080,00	100,37%
	Pendapatan Transfer Antar	157.862.086.000,00	163.339.494.803,00	103,47%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
	Daerah			
	Bantuan Keuangan			
	JUMLAH (II)	2.209.563.280.000,00	2.222.632.960.883,00	100,59%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	3.795.000.000,00	8.794.749.700,00	231,75%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	129.378.500.000,00	128.590.591.983,00	99,39%
	JUMLAH (III)	133.173.500.000,00	137.385.341.683,00	103,16%
III	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.450.309.000,00	222.083.034.565,98	100,29
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	219.950.309.000,00	219.983.034.565,98	100,01
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00	140,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	216.350.309.000,00	216.983.034.565,98	100,29

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 merupakan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016-2021, yang menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, antara lain:

- 1) Masih tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin serta ketimpangan;
- 2) Masih tingginya angka pengangguran;

- 3) Pertumbuhan Ekonomi masih harus ditingkatkan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan pengelolaan potensi pariwisata, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata;
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan daya saing tenaga kerja;
- 5) Penurunan kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta potensi bencana yang tinggi;
- 6) Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih harus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Permasalahan yang menonjol pada tahun 2021 ini adalah pengangguran. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 6,03% pada akhir tahun 2021. Angka pengangguran tersebut semakin meningkat karena terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021 ini. Diperlukan usaha untuk menangani angka pengangguran yang akan meningkat ini dengan kegiatan jaring pengaman ekonomi, seperti bantuan modal bagi UMKM dan program padat karya produktif.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah:

***"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera,
Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan

potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

3. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
4. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
5. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan. Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 6 (enam) sasaran yaitu:

- a. membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

- c. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- f. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung operasional, dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal;

- c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- d. Program Pendidikan Menengah;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
dan
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- i. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- l. Program Badan Layanan Umum Daerah; dan
- m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;

- g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
 - h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - j. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya;
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
 - m. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - n. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
 - o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
 - p. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
 - q. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
 - r. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - s. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - t. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
 - u. Program Pengendalian Banjir.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
 - c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

- d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan
- h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- d. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma;
- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
- b. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
- c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Pengendalian Banjir;
- f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
- g. Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- j. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
- k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- l. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- b. Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan;
- f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan
- c. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
- c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
- c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
- e. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- e. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja BUMD.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15. Persandian

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; dan
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan);
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; dan
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

4. Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
- c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

6. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

7. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Struktur Industri;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
- e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

8. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- e. Program Kerjasama Pembangunan;
- f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
- g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;
- h. Program Pengembangan Data/Informasi;
- i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
- j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- c. Program Pendidikan Kedinasan;
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
- e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.

4. Penelitian dan Pengembangan

5. Fungsi Lainnya

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2021.

Hal ini untuk lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RKPD Tahun 2021. Sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETER ANGAN
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan		
	Program Pengelolaan Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan Pembangunan gedung sekolah	
		- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
		- Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	
		- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik,	
		- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	
		- Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD	
		- Fasilitasi BOP PAUD	
		- Pembinaan PAUD Negeri	
		- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	
		- Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	
		- Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	
		- Pembangunan gedung sekolah	
		- Penambahan ruang kelas	
		- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
		- Pengadaan mebeluer sekolah	
		- Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	
		- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	
		- Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	
		- Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	
		- Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	
		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		- Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB	
		- Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	
		- Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	
		- Fasilitasi Pendidikan Inklusi	
		- Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	
		- Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	
		- Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK untuk pemenuhan SPM Pendidikan	
		- Pengembangan pendidikan keaksaraan	
		- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
		- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	
		- Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	
		- Penyelenggaraan paket A setara SD	
		- Penyelenggaraan paket B setara SMP	
		- Penyelenggaraan paket C setara SMU	
		- Pelaksanaan Sertifikasi pendidik, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
		- Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	
		- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
		- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	
		- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	
		- Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	
		- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
2.	Kesehatan		
	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	- Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
		- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	
		- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	
		- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	
		- Revitalisasi Posyandu untuk peningkatan kapasitas petugas promkes, pengelola prokjanal dan kader posyandu	
		- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
		- Peningkatan imunisasi	
		- Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	
		- Penyusunan standar pelayanan kesehatan	
		- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	
		- Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	
		- Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	
		- Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	
		- Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga)	
		- Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	
		- Pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk pemulihan kepada balita gizi buruk dan suplemen gizi	
		- Taburia bagi anak usia 6 - 59 bulan	
		- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)	
		- Anemia Gizi Besi	
		- Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)	
		- Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	
		- Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	
		- Pelayanan Penyehatan Lingkungan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Surveilans Kualitas Air 3 kali	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (khusus untuk Peningkatan Pelayanan BLUD)	- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	
		- Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	
		- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	
		- Pengembangan ruang operasi	
		- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	
		- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	
		- Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	a. Program Penyelenggaraan Jalan	- peningkatan jalan dan jembatan	
		- penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan jalan	
		- pembangunan jalan	
		- penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jembatan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- pembangunan jembatan	
		- monitoring dan evaluasi	
		- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
		- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
		- Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
		- Pengadaan alat-alat berat	
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	
	b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	
		- Perencanaan turap/talud/bronjong	
		- Pembangunan turap/talud/bronjong	
	c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	- Rekomendasi penerbitan IUJK	
	d. Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		- Pengembangan teknologi pengolahan air minum	
		- pembangunan SPAM	
		- pemeliharaan SPAM	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Pengembangan teknologi pengolahan air limbah	
		- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan target	
	f. Program Penataan bangunan Gedung	- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	
		- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan	
		- Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman, serta Perencanaan Gedung	
	g. Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	
	h. Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	- rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	
		- Pengembangan sarana dan prasarana irigasi pertanian	
		- Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	
		- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	
		- Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	
		- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
		- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
		- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	
		- Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
		- Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	
		- Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Pengawasan pemanfaatan ruang	
	j. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	
		- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	a. Program Pengembangan Perumahan	- Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	
		- Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
	b. Program Kawasan Permukiman	- Penanganan luasan permukiman kumuh	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	a. Program Penanggulangan Bencana	- Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	
		- Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam	
		- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
		- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	
		- Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	
		- Droning air bersih	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pelatihan penanggulangan bencana	
		- Penyusunan peta resiko rawan bencana	
		- Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	
		- Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana	
		- Pengembangan sekolah aman bencana	
		- Pelatihan tekhnis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	
	b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	
		- Pengendalian keamanan lingkungan, Rakor Kamtibmas	
		- Rakor Kamtibmas, Evaluasi Kamtibmas dan jumlah informasi intelejen	
		- Pembinaan Anggota Linmas dan Pelatihan Anggota Linmas	
		- Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	
		- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial	
		- Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	
		- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	
		- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	
		- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	
		- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	
		- Penegakan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	
		- Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	
		- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
6.	Sosial		
	a. Program rehabilitasi Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dan Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	
		- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	
		- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	
		- Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	
		- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
		- Pendataan PMKS dan PSKS	
		- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	
		- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dan Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	
	b. Program Pemberdayaan	- Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Sosial	masyarakat	
		- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	
		- Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	
		- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	
		- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	
		- Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	
	c. Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Fasilitasi kepada pekerja migran	
	d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Pendaataan Kemiskinan	
	e. Program Penanganan Bencana	- Penyediaan makanan bagi korban bencana	
		- Penyediaan sandang bagi korban bencana	
		- Penyediaan tempat penampungan pengungsian bagi korban bencana	
		- Rentan korban bencana alam dan sosial yang tertangani	
		- Pelayanan psikososial bagi korban bencana	
		- Relawan Kawasan dan Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja		
	a. Program Penempatan Tenaga Kerja	- Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, kerjasama pendidikan dan pelatihan, penyiapan tenaga kerja siap pakai	
		- Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja, dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	
	b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembangunan balai latihan kerja	
		- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	
		- Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	
		- Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja	
	c. Program Hubungan Industrial	- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	
		- Pembinaan Ketenagakerjaan LKS Tripartit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	
		- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak; Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		- sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		- Pembinaan organisasi perempuan	
		- Pembinaan PKK	
		- Pembinaan Berbasis Gender	
	- Program Perlindungan Perempuan	- Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	
	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	- Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) tingkat Kecamatan dan Desa yang terfasilitasi dan Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	- Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	- Dokumen informasi dta terpilah gender dan anak tingkat kabupaten	
	- Program Pemenuhan Hak Anak	- Fasilitasi Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa, KPAD, KPAK dan Kegiatan KLA	
	- Program Perlindungan Khusus Anak	- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kartika Kabupaten dan penanganan kasus kekerasan	
3.	Pangan		

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	a. Program Penanganan Kerawaanan Pangan	- Penanganan daerah rawan pangan	
		- Pengembangan cadangan pangan daerah	
		- Pengembangan lumbung pangan desa	
		- Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	
	b. Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Peningkatan mutu dan keamanan pangan	
	c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	
4.	Pertanahan		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
5.	Lingkungan Hidup		
	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan IKPLHD	
	b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	- Pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi GRK	
		- Pengendalian polusi dan pencemaran	
		- IPAL industri kecil/biogas	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Penanganan limbah industri tembakau DBHCHT, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, dan rencana aksi pengembangan sumber daya genetik	
	c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	- Pembinaan pengelolaan limbah b3	
	e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Rekomendasi izin lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	
	f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	- Pendampingan penyusunan perdes lingkungan hidup dan sekolah adiwiyata/saka kalpatar	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	- Pemantauan penilaian penghargaan lingkungan hidup	
	h. Program Pengelolaan Persampahan	- Review Jakstrada, pendampingan pengelolaan Bank Sampah/TPS3R dan pembinaan/sosialisasi pengelolaan persampahan	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a. Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Layanan pendaftaran penduduk (KTP, KIA, KK, pindah datang, SKTT, suket kependudukan, SKTS)	
		- Kegiatan penataan administrasi kependudukan	
	b. Program Pencatatan Sipil	- Kegiatan pelayanan pencatatan sipil	
		- Kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	
	c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
		- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	a. Program Peningkatan Kerjasama Desa	- Fasilitasi kerjasama antar Desa	
		- Fasilitasi kegiatan TMMD dan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Fasilitasi kawasan perdesaan, fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi Desa, kegiatan TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP kawasan, fasilitasi kerjasama antar Desa	
	b. Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli, Pelaksanaan Penghargaan Desa Award (Lomba inovasi desa, Lomba Gototng Royong, Kades Teladan, UPK Terbaik, Dekelana, Bumdes terbaik, Pasar Desa Terbaik, Pendamping Desa terbaik)	
		- Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	
		- Fasilitasi musrenbangdes/kel	
		- Fasilitasi APBDes	
		- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
		- Fasilitasi BUMDes	
		- Fasiltasi kelembagaan pengelolaan aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan	
		- Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	
		- Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan IDM	
		- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
		- Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Fasilitas DD, ADD, BH Pajak dan Retribusi kepada Desa, Bantuan Keuangan dan Siltap	
	c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Pembinaan KP SPAMS, fasilitas pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan lembaga adat,	
		- fasilitas pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	
		- Pembinaan kelompok usaha lembaga ekonomi msyarakat desa (UED-SP, CPPD, UP2K) dan pasar desa	
		- Pembentukan Posyantekdes	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a. Program Pengendalian Penduduk	- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	
		- Kegiatan pendidikan kependudukan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan	
		- Penyusunan dokumen parameter kependudukan, profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, penyusunan kajian dampak kependudukan	
	b. Program Pembinaan Keluarga Berencana	- Advokasi program KKBPK dan penyediaan sarana KIE utnutk KKBPK	
		- Promosi dan KIE program KKBPK	
		- Operasional PKB/ PLKB	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pembinaan PPKB dan Sub PPKBD	
		- Fasilitasi kesehatan yang terfasilitasi alat dan bobot kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB dalam meningkatkan kesertaan penggunaan MKJP, serta kesehatan	
		- Fasilitasi Kampung KB	
	c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	- BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stuntin	
		- Pembinaan anggota kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R) dan edukasi desa Stunting	
		- Pemberdayaan UPPKS	
9.	Perhubungan		
	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Penyusunan dokumen Evaluasi dan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ, dokumen tatralok kabupaten dan kajian trayek angkutdes	
		- Pengadaan LPJU dan Perlengkapan Jalan	
		- Rehabilitasi LPJU dan Perlengkapan Jalan	
		- Koordinasi pengawasan parkir	
		- Pelaksanaan KIR	
		- Pelaksanaan operasi laik jalan, rekayasa jalan, pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas	
		- Pelaksanaan Andalalin	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Sosialisasi keselamatan LLAJ	
		- Izin trayek	
10.	Komunikasi dan Informatika		
	a. Program Informasi dan Komunikasi Publik	- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	
		- Pembinaan PPID, Pembinaan Tim Pengelola Aduan, Bakohumas	
		- Pertemuan LKM dan FK Metra	
	b. Program Aplikasi Informatika	- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Siskeudes, Simda Keuangan dan Simda Barang secara online, surveillance SMKl dan pengadaan SSL Domain dan Sub Domain, pengadaan item server, penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, pelaksanaan surveillance ISO 27001, pengadaan jasa sewa internet untuk pemerintah daerah	
		- Pengelolaan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengadaan aplikasi lisensi branded, pemetaan dan pengauditan aplikasi pada OPD	
		- Pengadaan programmer, pelaksanaan forum smart city	
11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	a. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	
	b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	- Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	- Pelatihan SPI, BINTEK, SAKETAP, pembinaan kebutuhan koperasi	
	d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	- Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	
	e. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	- Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	
		- Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	
		- Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	
		- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
		- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	
	f. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
		- Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	
12.	Penanaman Modal		
	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Penyusunan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	
		- Penyusunan rencana umum penanaman modal dan peta potensi investasi	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Penyelenggaraan promosi investasi	
	b. Program Pelayanan Penanaman Modal	- Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
		- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	
		- layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	
	c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Monev wasdal penanaman modal, fasilitasi penanaman modal	
		- Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	
	d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Tersusunnya sistem informasi penanaman modal	
		- Survey kepuasan masyarakat	
13.	Kepemudaan dan Olahraga		
	a. Program Pengembangan Kapassitas Daya Saing Kepemudaan	- Pembinaan organisasi kepemudaan	
	b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga	
		- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pengembangan Kepramukaan	- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	
14.	Statistik		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	
		- Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah	
		- Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan	
15.	Persandian		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	
16.	Kebudayaan		
	a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	- Pemeliharaan dan pengelolaan Kampung Jawa Kebumen	
		- Kegiatan fasilitasi bagi warga Penghayat Kepercayaan	
		- Pembinaan sumber daya, lembaga dan pranata tradisional	
		- Fasilitasi kegiatan gelar seni budaya	
		- Kegiatan dialog seniman dan pelaku seni	
	b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Pelindungan Cagar Budaya	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Alih media cagar budaya, kajian pengusulan warisan budaya	
18.	Perpustakaan		
	Program Pembinaan	- Pengembangan minat dan budaya baca	
	Perpustakaan	- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
		- Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	
		- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	
		- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	
		- Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	- Kegiatan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
17.	Kearsipan		
	a. Program Pengelolaan Arsip	- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	
		- Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	
C.	Urusan Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan		
	- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	- Kegiatan pelestarian sumber day ikan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	dan Perikanan		
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Pengembangan bibit ikan unggul	
		- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	
		- pembentukan kampung nila, bantuan kolam, bibit dan pakan ikan untuk rumah tangga miskin	
		- Pembinaan dan pengembangan perikanan	
	- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	
		- pembangunan tempat pelelangan ikan	
		- rehabilitasi tempat pelelangan ikan	
		- Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	
		- Pengembangan sarana alat tangkap	
		- Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan	
		- perlindungan nelayan terhadap bencana alam laut	
	- Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	
		- fasilitasi sarpras usaha garam rakyat	
		- bantuan ikan segar dan olah	
		- pembinaan pelaku usaha perikanan	
2.	Pariwisata		
	a. Program Pemasaran	- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Pariwisata		
	b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - pengembangan, sosialisasi dan penerapan swera pengawasan standarisasi - Pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas obyek wisata	
	c. Program Pengembangan Kemitraan	- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dan ekonomi kreatif - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	
3.	Pertanian		
	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Kegiatan evaluasi pohon induk terpilih Kelapa Genjah Entok Kebumen - Pembinaan dan denfarm calon kelompok penangkar benih - Pengadaan alat-alat pertanian dan bibit, kegiatan sentra hortikultura, diversifikasi perkebunan dan hortikultura - Pembinaan kelompok tani ternak	
	b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan serta koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian - Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian, peternakan dan penyuluhan - Kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	
	d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan	
	e. Program Penyuluhan Pertanian	- Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	
5.	Perdagangan		
	a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar pasar Daerah	
		- Kegiatan operasional ,penyediaan peralatan/sarana kebersihan Pasar	
		- Intensifikasi/Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	
		- Kegiatan pemberdayaan PKL dan pengelolaan Sistem Resi Gudang	
	b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Peredaran Barang dan Jasa sesuai ketentuan Tata Niaga Perdagangan Barang Bersubsidi, Bahan Berbahaya dan Barang Kena Cukai di Kabupaten Kebumen	
		- Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pengembangan Ekspor	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	
	d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Promosi akses pasar dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	
6.	Perindustrian		
	a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Koordinasi Pembangunan Kawasan Industri	
		- Kegiatan pelatihan dan pendampingan pelaku industri dan IKM	
		- Pengadaan peralatan produksi gula semut	
	b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	- Fasilitasi perizinan IKM	
	c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	- Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	
7.	Transmigrasi		
	Program Pembangunan Kawasan	- pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Transmigrasi		
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Perencanaan		
	a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD,Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD, Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD	
		- Kegiatan penetapan dokumen RKPD Tahun 2022, RKPD Perubahan 2021, RPJMD Tahun 2021-2026	
		- Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan, profil daerah dan dokumen satu data	
	b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan, dokumen Laporan Capaian Target SDGs dan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan	
		- Penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perekonomian, Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	
		- Penyusunan dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	
		- Penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan dan perencanaan Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi dan Informatika dan Dokumen Koordinasi IPDMIP	
		- Penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.	Keuangan		
	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Penyusunan dokumen KUA PPAS APBD Murni dan Perubahan	
		- Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD Murni dan Perubahan	
		- Penyusunan dokumen Analisis Standar Belanda dan Standar Satuan Harga	
		- Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
		- Penyusunan dokumen Rekonsiliasi harian Jumlah dokumen Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank	
		- Tertib Penelitian SPM dan Penerbitan SKPP dan SP2D	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Penyusunan dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan dan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD	
		- Penyusunan dokumen pengesahan Laporan Fungsional SKPD	
		- Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	
		- Penyusunan dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
		- Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan daerah	
		- Kegiatan subsidi bunga melalui lembaga penyalur (BUMD/BUMS)	
		- Kegiatan Bantuan keuangan kepada desa	
		- Penyediaan belanja tidak terduga	
		- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten kepada Desa	
	b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang Milik dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	
	c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
		- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		- Penagihan Pajak Daerah	
3.	Kepegawaian		
	a. Program Kepegawaian Daerah	- Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemerintah Daerah	
		- Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	
		- Pemindahan tugas PNS	
		- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
		- Seleksi dan pembekalan serta pelantikan/pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	
		- Pembinaan karier/ penilaian angka kredit jabatan fungsional	
		- Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	
		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		- Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	
		- Penyusunan Analisis Beban Kerja	
		- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
		- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
		- Seleksi penerimaan calon PNS	
		- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
		- Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi - Proses penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen - Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen - Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen - Penyusunan data formasi dan DUK	
4	Pendidikan dan Pelatihan		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
		- Pendidikan dan pelatihan formal	
		- Pendidikan dan pelatihan teknis	
		- Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	
		- Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	
		- Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	
		- Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	
5.	Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		- Pengiriman peserta ujian dinas, ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
E	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Inspektorat Daerah		
	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
		- Reviu Laporan Kinerja	
		- Reviu Laporan Keuangan	
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
		- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
		- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
		- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

Keterangan ● Prioritas penanganan dampak Covid-19

Sumber : RKPD 2021

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas							
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatkan mutu pendid-dikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
				2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		1.3	Meningkat-nya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	d	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga
		1.4	Meningkat-nya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
				6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
				7	Meningkatkan upaya penanggulang-an penyakit		
				8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
				10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat							
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidup-an berbangsa dan bernega-ra berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama
				2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan							
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				2	Mengembang-kan kawasan perdesaan	b	Pembangun-an wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
				3	Mengembangkan Kawasan Industri		
				4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.
				5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
				6	Penganekara-gaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
				8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.
				9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
				10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
				11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung	14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
				15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	mantap		pengembangan wilayah	16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
				17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan pening-katan kualitas sarana - prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
				18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
				19	Meningkatkan kapasitas sarana dan pra-sarana bidang keciptakarya-an	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
				20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
				21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
				22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang tenaga-listrikan
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya	4.1	Meningkat-nya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat kerusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari						
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan							
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkat-nya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulang-an kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaa n, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	2.1	Meningkat-nya keterserapan tenaga kerja	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyaraat Ekonomi Asean (MEA)
				3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat							

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
		1.2	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama							
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkat-nya kapasi-tas kelemba-gaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
				2	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangun-an menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesimambungan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.2	Meningkat-nya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 11 (sebelas) Tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran yaitu :

- a. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran;
- b. Misi II terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran;
- c. Misi III terdapat 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran;
- d. Misi IV terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran;
- e. Misi V terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran; dan
- f. Misi VI terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Tabel 1. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,20	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,20
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	63,39	63,39
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	0,24	65,38
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	68/ 100.000 KH	68/ 100.000 KH
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,5/ 1000 KH	10,5/ 1000 KH
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagama-an	%	37,65	37,65%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran	10. Penurunan kasus pelanggaran hokum	Kasupra sarans	500	500 kasus

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021
	atas hukum				
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	3,91	6
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	25.179,48	25.179,48
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,21	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasa n	6 unit	6 Unit
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	6	6
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15,5	19,69
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	62,88	62,88
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,01	74,45
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	16,85	15,45
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	5,8	1,97%
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	83,87	83,87%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	99	96%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	B 3
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B 60	B 60
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	80%

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2021

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat daerah bersangkutan. Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Mendasari ketentuan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan SPM dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan sosial.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dasar hukum penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

c. Kebijakan Umum Daerah

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2021 ini, selain masih dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021, juga ditekankan dalam rangka untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19, sertaantisipasi dinamisasi permasalahan pembangunan daerah.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2016-2021 akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan :

1. Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu :
 - 1) Perumusan permasalahan pembangunan ;
 - 2) Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.
 - b. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb :
 - 1) Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;
 - 2) Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);
 - 3) Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota
 - 4) Dukungan nilai tambah.

2. Integrasi SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Integrasi SPM dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah;
4. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. Capaian Kinerja Makro

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,81	70,05	0,24
2	Angka Kemiskinan	17,59%	17,83%	0,24
3	Angka Pengangguran	6,07%	6,03%	-0,04
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,45%	3,71%	5,16

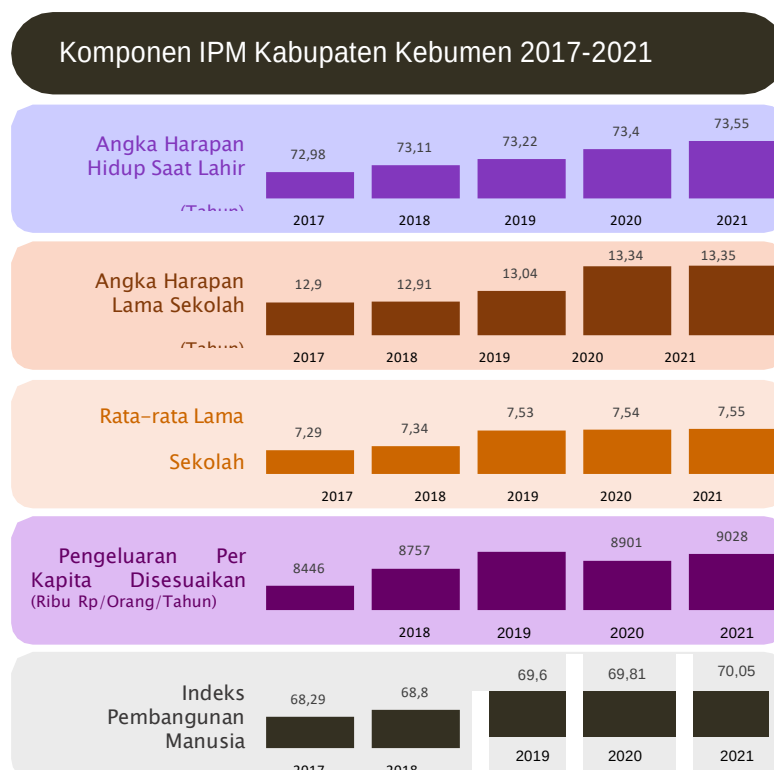
Sumber Data : BPS Kabupaten Kebumen 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Tercatat bahwa IPM Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 70,05 dan sudah mampu menduduki kategori 'tinggi'. IPM Kabupaten Kebumen berada pada peringkat ke-26 di Provinsi Jawa Tengah, menurun satu peringkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga masih diperlukan upaya ekstra agar bisa menembus 10 besar. Dengan posisi saat ini, Kabupaten Kebumen dibanding wilayah di sekitarnya, masih berada di bawah peringkat Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Banyumas, Cilacap, dan Magelang namun masih diatas Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Banjarnegara.

Kecepatan pencapaian pembangunan manusia diukur dengan pertumbuhan IPM. Pada tahun 2020-2021 Kabupaten Kebumen menempati peringkat ke 24 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal pertumbuhan IPM dengan pertumbuhan sebesar 0,34 persen, hal ini disebabkan oleh adanya 18 kabupaten/kota yang pada tahun 2019-2020 dengan pertumbuhan IPM dibawah Kabupaten Kebumen dan pada tahun 2020-2021 pertumbuhan IPM lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen. Pada periode sebelumnya (2019-2020) menempati peringkat ke 10, pada periode 2018-2019 berada di peringkat 3, di peringkat 24 pada periode 2017-2018 dan pada periode 2016-2017 berada di peringkat 7.

Grafik 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021



Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2017-2019 sempat mengalami penurunan dari 19,60% pada Tahun 2017 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Sementara itu, pada Tahun 2020-2021 terus mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 17,59% menjadi 17,83% atau 212,90 (ribu jiwa) dari jumlah penduduk miskin. Pandemi COVID-19 yang terjadi selama kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang salah satunya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2017-2021 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2018 sempat menurun yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada

tahun 2020 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2020 sebesar 2,62 dan kembali meningkat menjadi 3,24 pada tahun 2021, sedangkan P2 pada tahun 2020 sebesar 0,55 dan mengalami kenaikan menjadi 0,88 pada tahun 2021. Artinya perbedaan pengeluaran anatar penduduk miskin cenderung semakin melebar.

Tabel 2. 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen

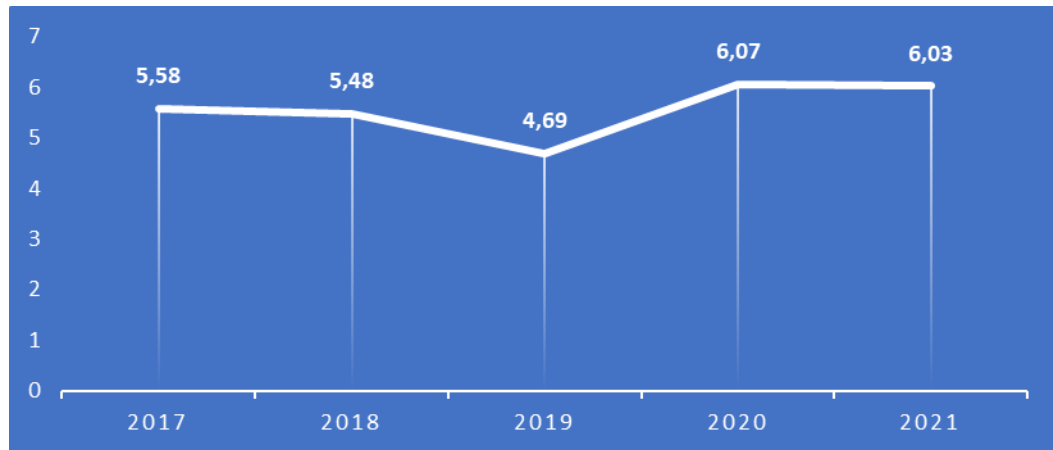
Profil Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	233.500	208.700	201.340	211.090	212.900
Persentase Penduduk Miskin	19,60%	17,47%	16,82%	17,59%	17,83%
Garis Kemiskinan	352,819	342,437	362,847	380.557	390.599
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	3,62%	2,48%	2,58%	2,62%	3,24%
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)%	0,99%	0,55%	0,65%	0,55%	0,88%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen 2021

c. Angka Pengangguran

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk Angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.

Grafik 2. 2 Angka Pengangguran Kabupaten Kebumen

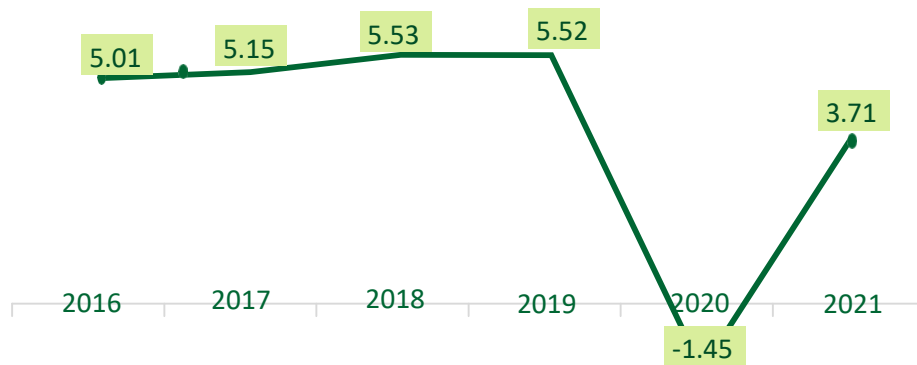
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen 2021

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2017-2021 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan selama periode Tahun 2017-2019 dari 5,15% pada Tahun 2017 menjadi 5,52% pada Tahun 2019. Namun pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,45%.

Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yaitu 3,71 dari tahun 2020 yaitu sebesar -1,45. Hal ini dipengaruhi naiknya angka pertumbuhan nasional di Tahun 2021 yang sudah di rilis oleh BPS dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 dan propinsi yaitu di sebesar 3,32.

Pertumbuhan ekonomi Kebumen tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 3,71 persen tetapi hal ini masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu 3,91. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 selengkapnya disajikan pada gambar berikut:

Grafik 2. 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2021

3.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2. 3 Capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Pendidikan					
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	413 lembaga	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	32.519 siswa	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.674 siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1586 orang	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.586 Orang	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	977 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	582 orang	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	122 sekolah	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	104.208 siswa	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	42.128 siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	104.208 siswa	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42.128 siswa	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.884 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.451 sekolah	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.884 orang	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.451 orang	Dinas Pendidikan	
		10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	763 orang	Dinas Pendidikan	
		11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	486 orang	Dinas Pendidikan	
		12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.165 orang	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		13.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	759 orang	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6.452 orang	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.175 orang	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	763 orang	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	122 orang	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.076 orang	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	685 orang	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	122 sekolah	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	104.208 siswa	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pemerintah Daerah			
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	42.128 siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	104.208 siswa	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42.128 siswa	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.884 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.451 sekolah	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.884 orang	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.451 orang	Dinas Pendidikan	
		10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	763 orang	Dinas Pendidikan	
		11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	486 orang	Dinas Pendidikan	
		12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.165 orang	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		13.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	759 orang	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6.452 orang	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.175 orang	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	763 orang	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	122 orang	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.076 orang	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	685 orang	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14 Sekolah	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.161 Siswa	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.161 Siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	231 Orang	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	216 Orang	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	153 Orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	763 Orang	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	15 Orang	Dinas Pendidikan	
	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11 Unit	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11 Unit	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (obat-obat)	18.879 Paket	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	148 Orang		
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.879 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	425 Orang		
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.849 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	602 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94.678 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	11.171 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	161.866 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	9.285 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	888.051 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.690 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	178.630 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6.045 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	101.499 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11.903 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	7	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4123 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	956 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.923 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	145 Orang	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.282 Paket	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	208 Orang	Dinas Kesehatan	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0%	DPU PR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0%	DPU PR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0%	DPU PR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0%	DPU PR	
		6. Rencana eknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0%	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0%	DPU PR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0%	DPU PR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0%	DPU PR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0%	DPU PR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0%	DPU PR	
		6. Rencana eknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0%	DPU PR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0%	Dinas PU PR	
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	75.17%	Dinas PU PR	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	Dinas PU PR	
	Pekerjaan	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Umum dan Penataan Ruang	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak	Dinas PU PR	
		3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	185	Dinas PU PR	
		5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	5.801	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	4.515	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	10.316	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	251	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	251	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.641	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	79,78%	DISPERKIM LH	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	19,58%	DISPERKIM LH	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	80,08%	DISPERKIM LH	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	64,37%	DISPERKIM LH	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	33,33%	DISPERKIM LH	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	75%	DISPERKIM LH	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	474,52%	DISPERKIM LH	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	3,96%	DISPERKIM LH	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,83%	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	725 dok	DPMPTSP	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Perda 26 2012 tentang Banguna Gedung (ada)	DPMPTSP	
		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	ada	DPMPTSP	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Ada	DISDIK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	Tidak ada	DISDIK	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	6.174	BPKAD	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	6.174	BPKAD	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	960.36 Km	Dinas PU PR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	3020 M	Dinas PU PR	
		3. Panjang jembatan yang dibangun	82 M	Dinas PU PR	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	7.837 Km	Dinas PU PR	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35 M	Dinas PU PR	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	8,694 Km	Dinas PU PR	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	70 M	Dinas PU PR	
		8. Panjang jalan yang dipelihara	5.364 Km	Dinas PU PR	
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	80 M	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	20%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	20 Ijin	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0%	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	6 Unit	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	6 Unit	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	6KK 30JIWA	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	6 Unit	DISPERKIM LH	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DISPERKIM LH	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	6KK 30JIWA	DISPERKIM LH	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	16,757	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	154,62 Ha	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	16955 Unit	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	155 Ha	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah di kab/kota	354807 rumah	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit PK RTLH	1695 unit	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	28035 unit	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DISPERKIM LH	
		5. Rasio rumah dan KK	0,847 KK	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	11 rumah	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DISPERKIM LH	
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DISPERKIM LH	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DISPERKIM LH	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DISPERKIM LH	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	2315	Satpol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2485	Satpol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	22	Satpol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenisancaman bencana	30,52%	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	7,86%	BPBP	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,34%	BPBP	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan	100%	BPBP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	50%	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	271 Layanan	Satpol PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 Pos	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	Satpol PP	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	Satpol PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	47 Unit	Satpol PP	
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	77 Orang	Satpol PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	66 Orang	Satpol PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	7	Satpol PP	
.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	7	Dinas Sosial	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	Dinas Sosial	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	913 Orang	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Unit	Dinas Sosial	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	190 Orang	Dinas Sosial	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	82 Orang	Dinas Sosial	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	590 Orang	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2 buah	Dinas Sosial	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	120 Orang	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2 Orang	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	305 Orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	120 Orang	Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	12 Orang	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5 Orang	Dinas Sosial	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	133 Orang	Dinas Sosial	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	10 Orang	Dinas Sosial	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	89 Orang	Dinas Sosial	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	48 Orang	Dinas Sosial	
	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	605 Jiwa	Dinas Sosial	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	37 Jiwa	Dinas Sosial	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	250 Paket	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	25 Orang	Dinas Sosial	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	305 Orang	Dinas Sosial	
	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	52,78%	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2,95%	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	576 Orang	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Persentase penyerapan lulusan	32,12%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	36,11%	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	9,87%	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	9,02%	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	105%	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	44	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	610	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	7622	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	14.609	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	41	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	14.609	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	146	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	39.47%	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	304	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Tenaga Kerja	
				Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1,16%	Dinas Tenaga Kerja	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	52	DispermadesP3A	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	41	DispermadesP3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	13	DispermadesP3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perlindungan anak	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DispermadesP3A	
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	DispermadesP3A	
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DispermadesP3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	31	DispermadesP3A	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40	DispermadesP3A	
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	371	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DispermadesP3A	
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	DispermadesP3A	
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	DispermadesP3A	
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DispermadesP3A	
	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana	82	Distapang	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	11	Distapang	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Distapang	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	11	Distapang	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100	Distapang	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	3	Distapang	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	26	Distapang	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	201	Distapang	
	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPMPTSP	
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Bag. Pemerintahan	
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi	0	Bag. Pemerintahan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.			
	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	0	DPMPTSP	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DPMPTSP	
	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap:	64,44	DISPERKIMLH	
		a. Indeks kualitas air (IKA)	52,37	DISPERKIMLH	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,99	DISPERKIMLH	
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	37,86	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100%	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	88,64%	DISPERKIMLH	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	5,13%	DISPERKIMLH	
		3. Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	DISPERKIMLH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DISPERKIMLH	
		5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100%		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	96%	DISPENDUKCAPIL	
		2. Penerbitan akta perceraian	15%	DISPENDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	99.03%	DISPENDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan (berapa jumlah buku yang dicetak profil kependudukan)	2 Buku	DISPENDUKCAPIL	
	Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	34 Desa	DISPERMADES P3A	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	12 Desa	DISPERMADES P3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	449 Lembaga	DISPERMADES P3A	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	104 Desa	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaa n Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	34 Desa	DISPERMADES P3A	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	12 Desa	DISPERMADES P3A	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	449 Lembaga	DISPERMADES P3A	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	104 Desa	DISPERMADES P3A	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	0	Dinas Sosial	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	157.600	Dinas Sosial	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	322	Dinas Sosial	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program	75,63%	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		KKBPK (advokasi dan KIE)			
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20 Orang	Dinas Sosial	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	56%	Dinas Sosial	
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	71,38%	Dinas Sosial	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	20 Kelompok	Dinas Sosial	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	45,41%	Dinas Sosial	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	230	Dinas Sosial	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	55,06%	Dinas Sosial	
	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	40%	Dinas Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	117,83%	Dinas Perhubungan	
		3. Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	71,74%	Dinas Perhubungan	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	39,91%	Dinas Perhubungan	
	Kominfo	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi diJaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh DinasKominfo	100%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	Dinas Kominfo	
	Kominfo	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daringdengan memanfaatkan domain	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015			
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas Kominfo	
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo	
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Kominfo	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	87,74%	Dinas Kominfo	
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	47,76%	Dinas Kominfo	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		layanan pusat data pemerintah			
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo	
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas Kominfo	
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Dinas Kominfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	28%	Dinas Kominfo	
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		14. Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%	Dinas Kominfo	
	Kominfo	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas Kominfo	
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Kominfo	
	KUKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	92%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	91%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk	18%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data dan UMK	Ket
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	20,53%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,11%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2,63%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90,79%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,63%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45,79%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	2,4%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		dan UMK	
	KUKM	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,49%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2,44%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,13%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		5. Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		6. Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan pemasaran	0,93%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,04%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 Perda 8 fasilitas	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 kali	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 kali	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2900 orang	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	725 dok	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 488.529.005.110,-	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	24 orang	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	135 perusahaan	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	2	DPMPTSP	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	200	DINAS PARIWISATA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	60	DINAS PARIWISATA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	422	DINAS PARIWISATA	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	42	DINAS PARIWISATA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	27 orang	DINAS PARIWISATA	
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4 keg	DINAS PARIWISATA	
	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	0	DINAS KOMINFO	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	DINAS KOMINFO	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	DINAS KOMINFO	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DINAS KOMINFO	
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DINAS KOMINFO	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	DINAS KOMINFO	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	DINAS KOMINFO	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	DINAS KOMINFO	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%	DINAS KOMINFO	
	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	20	DINAS PENDIDIKAN	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	20	DINAS PENDIDIKAN	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	20	DINAS PENDIDIKAN	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	50	DINAS PENDIDIKAN	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	91	DINAS PENDIDIKAN	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1	DINAS PENDIDIKAN	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DINAS PENDIDIKAN	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	DINAS PENDIDIKAN	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	DINAS PENDIDIKAN	
	Kebudayaan	1. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DINAS PENDIDIKAN	
		2. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	DINAS PENDIDIKAN	
		3. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	DINAS PENDIDIKAN	
		4. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DINAS PENDIDIKAN	
		5. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	DINAS PENDIDIKAN	
		6. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	2	DINAS PENDIDIKAN	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	50	DINAS PENDIDIKAN	
		8. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	50	DINAS PENDIDIKAN	
		9. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	DINAS PENDIDIKAN	
		10. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DINAS PENDIDIKAN	
	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.54%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	20.35%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.07%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5.8%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4980	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	2	Dinas Kearsipan dan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Perpustakaan	
	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	3%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100% (2)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100% (2)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	100% (2)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100% (1)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100% (2)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100% (1)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kelautan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4854	dinas kelautan	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	dinas kelautan	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	6	dinas kelautan	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	181	dinas kelautan	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	37.18	dinas kelautan	
	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	117	Dinas Pariwisata	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1697	Dinas Pariwisata	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	26	Dinas Pariwisata	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dinas Pariwisata	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	9	Dinas Pariwisata	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	3,01%	Dinas Pariwisata	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	253	Dinas Pariwisata	
	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	166 Kelompok	Dinas Pertanian	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	419 Paket	Dinas Pertanian	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	1 Dok	Dinas Pertanian	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	100%	Dinas Pertanian	
	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular)	22,50%	Dinas Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah	0%	DPMPTSP	
	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100%	Disperindag	
		2. Persentase penerbitan TDG	100%	Disperindag	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	8,06%	Disperindag	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		Disperindag	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	100%	Disperindag	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0%	Disperindag	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%	Disperindag	
		5. Persentase pemeriksaanfasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	Disperindag	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0%	Disperindag	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	84%	Disperindag	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,90%	Disperindag	
	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	82%	Disperindag	
	Perdagangan	1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	52%	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%	Disperindag	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	100%	Disperindag	
	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	Disperindag	
	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	0,01%	Disperindag	
	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada Ikk Output			

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pengadaan	Tidak ada Ikk Output			
	Kepegawaian	Tidak ada Ikk Output			
	Manajemen Keuangan	Tidak ada Ikk Output			
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Tidak ada Ikk Output			

Sumber : data diolah

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2. 4 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,34%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,49%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	39,21%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,38%	Dinas Pendidikan	
Kesehatan					
	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,10%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,96%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	99,70%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
		persalinan			
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,09%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97,78%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,92%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65,39%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,12%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,00%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,29%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	89,89%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	51,88%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	0	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	dan Penataan Ruang	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai (Pemecah Ombak) di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUPR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,78%	Dinas PUPR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	87,80%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,74%	DISPERKIM LH	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas PUPR/DPMPTSP	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	78.26%	Dinas PUPR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	82.38%	Dinas PUPR/disnaker	
	Pekerjaan Umum dan Penataan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Bagian Pembangunan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Ruang				
Perumahan Rakyat					
	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	2,94%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,90%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	Dinas PERKIM LH	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	207.512 org	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3930 org	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	24400 org	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,5 menit	Satpol PP	
Sosial					
	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	98,22%	Dinas Sosial	
	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	69,77%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,426%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	133907,30%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	9,016%	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	51,81%	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	19.30%	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,017%	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	15.89%	DISPERMADES P3A	
Pangan					
	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	285.94%	Dinas Pertanian	
Pertanahan					
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	DPMPTSP	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DISDIK, DPU, DINKES, DISPORAWISATA	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0%	BAP3DA/ DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	DPMPTSP/BPN	
	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	BAG. PEMERINTAHAN/BPN	
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	64,44	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	59,14%	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	11,36%	DISPERKIMLH	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98,09%	DISPENDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	39,66%	DISPENDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	95,35%	DISPENDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12,50%	DISPENDUKCAPIL	
Pemberdayaan Masyarakat					
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	40%	Dispermades P3A	
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,313%	Dispermades P3A	
Keluarga Berencana					
	Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,35%	Dinas Sosial	
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,05%	Dinas Sosial	
	Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17,66%	Dinas Sosial	
Perhubungan					
	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,35	Dinas Perhubungan	
	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	71,74%	Dinas Perhubungan	
Kominfo					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo	
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30,77%	Diskominfo	
	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Diskominfo	
Koperasi Usaha Kecil Menengah					
	KUKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,95%	Disnaker UMKM	
	KUKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,78%	Disnaker UMKM	
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	25,70%	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,02%	Dinas Pariwisata	
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,6%	Dinas Pariwisata	
	Pemuda dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	157	Dinas Pariwisata	
Statistik					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo	
	statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	65,93%	Dinas Pendidikan	
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	45,32%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,41%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan					
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan					
	Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	12.867,53	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pariwisata					
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-93,59%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	13,183%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	47,71%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,07%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	12,94%	Dinas Pariwisata	
Energi Sumber Daya Mineral					
	ESDM	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin diKabupaten/Kota	0%	DPMPTSP	
Pertanian					
	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,08%	Dinas Pertanian	
	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-4,97%	Dinas Pertanian	
Perdagangan					
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	DISPERINDAG	
	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	83,04%	DISPERINDAG	
	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	52,25%	DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perindustrian					
	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0.021%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (rumus adalah Keterkinian informasi industri + kelengkapan informasi industri) liat juknis	100%	DISPERINDAG	
	Transmigrasi	Tidak ada IKK Outcome			

Sumber : data diolah

c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perencanaan dan Keuangan					
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	25,88%	BPKAD	
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	13,46%	BPKAD	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2,66	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures	20,65%	BPKAD	
	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	BPKAD	
Pengadaan					
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	

	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	207,68%	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	45,80%	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian					
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	149,17%	BKPPD	
	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,33%	BKPPD	
	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,75%	BKPPD	
Manajemen Keuangan					
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,02%	BPKAD	
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	33,18%	BAPPENDA	
	Manajemen Keuangan	Assets Management	Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
	Manajemen Keuangan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	8.03%	BPKAD	

Transparansi dan Partisipasi Publik					
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DISKOMINFO	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,33%	DISKOMINFO	

Sumber data : data diolah

3.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU Kabupaten Kebumen) sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut sekaligus.

Tabel 2. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,2	13,35	101,14%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,2	7,55	105%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	61,47	68,01	111%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	65,38	62,84	94,38%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,55	101 %
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	68	201,6	-96,47%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,5	9,23	112,1%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	37,65	16,04%	154,50%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasupra sarans	500	65	187%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	3,91	3,9	99,74%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	25.179,48	24.384,41	96,84%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,21	0,21	100%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	6	5	83%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi	%	6	25,66	124,63%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		PMA/PMDN				
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	19,69	13,18	66,94%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	62,88	78,58	124,97%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,01	64,43	87,05%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	16,85	17,83	94,18%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	5,8	6,03	96,03
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	83,87	86,58	103%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	99	100	101%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	A (3,3226)	110,75%
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B 60	B 63,84	106,4%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP atas LKPD 2021	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	22,22	27,77%
Rata-Rata						95,83%

Sumber data : Bagian Organisasi Tahun 2021

Rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1	Misi 1	1	4	7	6	-	-	1
2	Misi 2	2	2	3	2	1	-	-
3	Misi 3	4	5	8	2	6	-	-
4	Misi 4	2	2	2	-	2	-	-
5	Misi 5	1	2	2	2	-	-	-
6	Misi 6	1	2	4	1	2	-	1
	Jumlah	11	17	26	13	11	0	2
Prosentase (%)					50 %	42,3 %	-	7,7 %

Sumber Data : Pengolahan Data IKU Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Hasil analisis bahwa dari 11 (sebelas) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja /sasaran, diketahui bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 50% pencapaiannya dengan kriteria **Sangat Baik**, 11 (sebelas) indikator sasaran atau 42,3% pencapaiannya dengan kriteria **Baik** dan 2 (dua) indikator sasaran atau 7,7% pencapaian dengan kriteria **Kurang Baik**. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 108,79% atau bermakna **Sangat Baik**. Jadi rata-rata capaian kinerja lebih baik dari pada rata-rata capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 di angka (71,46%). Faktor upaya pemulihan pasca pandemic covid-19 Kebumen sudah mulai beradaptasi *new normal* yang mempengaruhi kinerja tahun 2021.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kebumen, maka capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2021 Terhadap RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,20	13,35	101,14%	13,20	101,14%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,55	104,86%	7,20	104,86%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	63,39	68,01	107,29%	63,39	107,29%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	65,38	62,84	94,83%	65,38	94,83%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,50	73,55	100,06%	73,50	100,06%
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	68/ 100.00 0 KH	201,6/ 100.000 KH	-96,47%	68/ 100.000 KH	-96,47%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,5/ 1000 KH	9,23/ 1000 KH	112,1%	10,5/ 1000 KH	112,1%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%	100%	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus	%	37,65	16,04%	154,50%	37,65%	154,50%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan						
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasuprasaran s	500	65 kasus	187%	500 kasus	187%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	%	3,91	3,9	99,74%	6	65%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	25.179,48	24.284,41	96,84%	25.179,48	96,84%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,21	0,21	100%	0,21	100%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	6 unit	5 Unit	83,33%	6 Unit	83,33%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	6	25,66	124,63%	6	124,63%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	19,69	13,18%	66,94%	19,69	66,94%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	62,88	78,58	124,97%	62,88	124,97%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,01	71,18	96,17%	74,45	95,6%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	16,85	17,83	94,18%	15,45	86,65%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	5,8	6,03%	96,03%	1,97%	36,03%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	83,87	86,58	103,23%	83,87%	103,23%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	99	100%	101%	96%	104,17%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	A (3,3226)	110,75%	B 3	110,75
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B 60	B 63,84	106,4%	B 60	106,40%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00%	22,22%	27,77%	80%	27,77%
Rata-Rata						96,05%		92,22%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 13,35 dari target 13,20 dengan capaian kinerjanya 101,14% atau kategori capaian Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi angka harapan lama sekolah tahun 2021 lebih tinggi yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,35 tahun atau setara dengan Diploma I.

Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2021 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Kebumen yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Untuk interpretasinya dapat

dicontohkan RLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 104,86% atau bermakna Sangat Baik. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,55 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,20 tahun. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Kurang Mampu (BKM). Selain itu, keberhasilan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk berusia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

3. Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan Tahun 2021 dengan capaian kinerja 107,29% atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020 ada peningkatan realisasi Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan. Berdasarkan perhitungan rumus indikator Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 sesuai dengan target capaian di akhir tahun RPJMD. Meskipun targetnya dapat tercapai, bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target Persentase Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

4. Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga

Pada indikator sasaran ini dari target yang ditetapkan sebesar 65,38 dengan realisasi sebesar 62,84 atau capaian kinerja 94,38% dengan kriteria Sangat Baik. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 ada peningkatan realisasi Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga dikarenakan pada semester kedua tahun 2021 sudah dilaksanakan beberapa kegiatan cabang olah raga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga untuk berlatih dan anggaran.

Untuk meningkatkan pengembangan pada bidang kepemudaan dan olahraga memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal ini terkait dengan sarana dan fasilitas-fasilitas untuk berlatih yang memadai dan juga kesejahteraan para atlet. Pemberian tali asih kepada atlet perlu ditingkatkan nilainya, dikandung maksud untuk meningkatkan semangat atlet dalam bertanding. Peningkatan jumlah anggaran untuk bidang kepemudaan dan olahraga sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian prestasi pemuda dan olahraga.

5. Angka Harapan Hidup

Pada indikator sasaran angka harapan hidup Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021, Kabupaten Kebumen telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 0,68 tahun. Pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 72,87 tahun dan pada tahun 2021 Angka Harap Hidup 73,50 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 100,06 % atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**.

Angka Harapan Hidup tahun 2021 ditargetkan 73,50 tahun, terealisasi 73,55 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,06 % atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Meskipun secara umum Angka harapan hidup sangat berhasil namun indikator ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya yaitu Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, angka kesakitan dan angka penemuan penyakit menular, yang kinerjanya perlu terus ditingkatkan.

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan di Indonesia berdampak pada Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia yang ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, keterbatasan pemenuhan sarpras dan alkes untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.

Solusi untuk mempertahankan target akhir RPJMD yang bisa dilakukan dan perencanaan kedepan antara lain : mengutamakan upaya promotif, preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM, pemahaman perencanaan dalam penterjemahan pola pelayanan kesehatan, pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah geografis, pemahaman pelaksana maupun stakeholder bahwa pelayanan primer bukan merupakan pelayanan kuratif, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukan.

Pada tahun 2021 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar. Rp. 110.881.875.437,-

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 10,21 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

6. Angka Kematian Ibu

Pada indikator sasaran angka kematian ibu dari target yang ditetapkan sebesar 68/100.000 KH dengan realisasi sebesar 201,6/100.000 KH atau capaian kinerja -96,47% dengan kriteria Kurang Baik.

Pada tahun 2021 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini salah satunya karena adanya pandemi Covid berdampak pada penurunan kesehatan Ibu Hamil. Adapun dari jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, meninggal dalam keadaan hamil 17 orang, keadaan bersalin 3 orang dan ibu nifas 18 orang. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 27 orang, kemudian pada kelompok umur >35 tahun sebanyak 11 orang dan pada kelompok umur <20 tahun sebanyak 0 orang. Dari total kematian Ibu (maternal) sebanyak 38 kasus terbanyak dikarenakan perdarahan sebanyak 6 orang, hipertensi pada kehamilan sebanyak 2 orang, dan karena penyebab lain 30 orang (22 orang karena terkonfirmasi Covid, 1 orang dengan penyakit jantung, 1 orang dengan CHF, 3 orang dengan infeksi paru-paru (pneumonia, TBC), 1 orang dengan mioma uteri, 1 orang dengan thalasemia dan 1 orang karena Emboli air ketuban).

Keberhasilan upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan ibu nifas, (4) pelayanan komplikasi kebidanan dan (5) pelayanan kontrasepsi. Adapun kendala/hambatan antara lain masih kurangnya catatan yang baik dari data ibu hamil kehamilan resti ataupun faktor resiko, belum diadakannya evaluasi secara mendalam mengenai

angka kematain ibu dan komplikasi dalam kehamilan, pelaksanaan jejaring rujukan kurang optimal.

Upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu antara lain terus meningkatkan Upaya program kerja tentang kesehatan ibu (upaya promotif, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, Pemberdayaan Keluarga Berencana), Peningkatan antenatal yang berkualitas (mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai), pelayanan pasca persalinan/kelahiran yang aman, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri yang komprehensif mudah dijangkau serta meningkatkan jejaring rujukan Puskesmas PONEK ke RS PONEK.

Pada tahun 2021 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.881.875.437,-

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 10,21 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

7. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan

kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun.

Selama periode 2016 hingga 2021 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan Angka Kematian Bayi, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Angka Kematian Bayi tahun 2021 ditargetkan 10,5/1000 KH, terealisasi 9,23 / 1000 KH atau pencapaian kinerja sebesar 112,1 % kategori capaian kinerja Sangat Baik.

Pada tahun 2021 Angka kematian bayi sebanyak 174 kasus tersebar pada 26 kecamatan. sebagian besar meninggal pada saat usia 0-28 hari sebanyak 122 kasus/ bayi , dan pada usia 29 hari – 11 bulan sebanyak 52 kasus/ bayi. Sedangkan untuk penyebab kematian bayi dikarenakan antara lain 23,56 % karena BBLR (Bayi dengan berat badan lahir rendah), 16,67% karena asfeksia atau gagal nafas setelah lahir, 14,94 % karena kelainan bawaan dan pada 44,83 % nya karena penyebab lain-lain.

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu

1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun.

Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali, yaitu pada 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Keberhasilan percepatan penurunan kematian Bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal peran serta terutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan.

Pada tahun 2021 indikator Angka Kematian Bayi didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi,

Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar. Rp. 110.881.875.437,- . Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 10,21 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

8. Angka Melek huruf Al Quran Siswa Lulus

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100% atau kategori capaian kinerja Baik. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020 capaiannya sama yaitu 100%. Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sama yaitu seluruh siswa kelas 6 (enam) SD/MI dan siswa kelas 3 (tiga) SMP/MTs sebesar 100 persen, yang berarti bahwa seluruh siswa tersebut melek huruf Al Qur'an.

Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

Misi kelima yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator sasaran yaitu Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus perhitungan Capaian Penurunan (Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun $n+$ Penemuan Kasus Baru HIV tahun n + Kasus Pertikaian Agama tahun n).

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerjanya sebagai langkah preventif sifatnya. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 157,40 % atau masuk pada kriteria capaian kinerja Sangat Baik.

Kendala atau hambatan dalam mencapai realisasi kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diantaranya selesainya dukungan dari global fund dalam penanggulangan AIDS, Desa belum menganggarkan program WPA melalui APBDes, Program HIV AIDS tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, dan Pemberian pengetahuan HIV-AIDS kepada masyarakat belum menyeluruh.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif yaitu : menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang HIV-AIDS pada guru Bimbingan konseling dan penyuluh agama, sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan remaja, Pelatihan kepada pendamping ODHA, pelatihan tentang kesehatan pada OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA), penyusunan buku panduan Warga Peduli AIDS (WPA), Sosialisasi buku panduan WPA kepada pendamping Desa, pemberian bantuan dan pelatihan kepada ODHA, program pencegahan HIV AIDS melalui transmisi seksual pada hotspot, pelatihan pengorganisasian Warga Peduli AIDS dan Komunikasi yang intensif antar Kementerian Agama, FKUB, MUI dan Kepolisian.

10. Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum

Indikator Kasus pelanggaran hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat dan temuan petugas dalam menegakkan perda/ perkara yang telah dilakukan pembinaan.

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 187% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik.

Realisasi pada tahun 2021 apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator penurunan kasus pelanggaran hukum mencapai 0,13 % dari 867 kasus pada tahun 2015 sampai dengan target 500 kasus di tahun 2021,

solusi atau upaya untuk mencapai target adalah dengan melakukan secara intensif dalam Penegakan Perda dan Pembinaan Trantibum.

Cakupan Penanganan penurunan kasus pelanggaran hukum semakin sedikit realisasi maka semakin baik kinerja. Sehingga usaha-usaha preventif untuk mengurangi kasus pelanggaran hukum perlu dijaga dan ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 yaitu kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Kegiatan ini adalah operasi gangguan Tibum yang mengedepankan upaya preventif dengan sanksi berupa pembinaan ditempat, teguran, dan pemberian Surat Peringatan I, II, III secara berjenjang tergantung tingkat kepatuhan si pelanggar. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini berupa sosialisasi/penyuluhan/pembinaan perda dan atau perkara untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkara. Upaya preventif pelanggar perda selalu dikedepankan namun demikian tindakan tegas pro justisi juga perlu ditegakkan. Melalui kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati para pelanggar perda yang telah melampau Surat Peringatan III dan masih melakukan pelanggaran akan dihadapkan di meja persidangan. Tindakan hukum yang tegas diharapkan akan memberi efek jera demi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2021 bukan berarti tidak ada kendala atau hambatan, upaya pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perda, pemberdayaan peran Satlinmas dan kader siaga trantib telah dilakukan namun demikian optimalisasi kegiatan yang menunjang pemeliharaan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat harus terus dilakukan. Kedepan pemberdayaan masyarakat dan utamanya anggota Satlinmas akan terus ditingkatkan, dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai institusi pengemban urusan Trantibumlinmas dan sub urusan Pemadam Kebakaran.

11. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,46%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar -2,65% dan pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi sebesar -2,07%.

Pengembangan perekonomian daerah juga harus didukung dengan infrastruktur yang mampu menghubungkan wilayah produksi ke wilayah pasar/konsumen, wilayah hulu ke wilayah hilir serta mampu mengurangi beban logistik. Selain itu juga diperlukan infrastruktur yang mantap yang akan menjadi wajah Kabupaten Kebumen sekaligus menjadi etalase aktivitas ekonomi masyarakat dengan pengembangan Koridor Perkotaan Kebumen.

Selain Pandemi Covid-19, isu lain yang akan menjadi tantangan sekaligus prospek bagi perekonomian daerah pada Tahun 2022 dan 2023 adalah tuntutan penerapan ekonomi hijau atau pembangunan rendah karbon dalam upaya pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu beberapa hal juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya melalui penghijauan di wilayah mata air, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah baik rumah tangga maupun industri, peningkatan pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), penggunaan LPJU dan rambu lalu lintas solar cell dan pengembangan pertanian organik sebagai potensi unggulan daerah.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3,91 % pada Tahun 2021, dan terealisasi sebesar 3,9% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,74% atau kategori capaian Baik. Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi perekonomian daerah di Tahun 2022 dan 2023 karena belum diketahui kapan akan berakhir. Seperti telah disebutkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dampak pandemi diperkirakan dapat berlangsung lama sehingga diperlukan proses pemulihan ekonomi hingga beberapa tahun ke depan. Untuk itu diperlukan arah kebijakan perekonomian daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap krisis. Kabupaten Kebumen Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis sebagai Visi Daerah Tahun 2005-2025 dapat menjadi

jalan keluar yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan komoditas pertanian khususnya pangan adalah komoditas yang tangguh terhadap krisis, komoditas yang selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari dalam jumlah yang besar. Akan tetapi dengan semakin sempitnya lahan pertanian maka diperlukan strategi dalam optimalisasi sektor primer salah satunya dengan pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Selain itu juga diperlukan kapasitas teknis kelembagaan pertanian agar sumber daya manusia pertanian dapat lebih optimal dalam menghasilkan output. Berbasis agrobisnis juga berarti bahwa pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer, akan tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Hal ini salah satunya akan dilakukan dengan pengembangan pertanian integratif berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan melalui program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT). Selain itu juga diperlukan dukungan pihak lain dalam pengembangan agrobisnis utamanya dalam bentuk investasi padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja seperti pengembangan shrimp estate di wilayah pantai selatan Kebumen.

12. Pendapatan per Kapita Penduduk

Capaian kinerja indikator pendapatan perkapita penduduk telah belum mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 96,84 % dengan kriteria capaian kinerja Baik.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kebumen tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp 24.284.416,- sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan, diperkirakan menurun karena adanya pandemic covid-19.

13. Rasio/Indeks Gini

Capaian kinerja indikator rasio/indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik.

Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 mencapai 0,21* yang jauh lebih rendah dari tingkat ketimpangan di level nasional yang mencapai skor 0,38*. Capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak berimbas kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menyasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi

Target dari Indikator terbangunnya kawasan industri merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2021 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan sehingga capaian Kinerja 100% atau kriteria capaian Baik. Kawasan pedesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata,

kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan).

Tujuan pembentukan kawasan pedesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri) yaitu :

- a. Kawasan pantai pesisir, terdiri dari Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Desa Pasir, Sрати, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo Kecamatan Ayah;
- b. Kawasan anyaman pandan, terdiri dari Desa Grenggeng, Wonorejo, Pohkumban Kecamatan Karanganyar, Desa Karanggayam, Penimbun, Kecamatan Karanggayam;
- c. Kawasan batik, terdiri dari Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen;
- d. Kawasan peternakan sapi terpadu, terdiri dari Desa Tanggulangin dan Jogosimo Kecamatan Klirong; dan
- e. Kawasan gula semut, terdiri dari Desa Jladri, Wonodadi, Rangkah, Geblug, Pakuran Kecamatan Buayan.

Pendampingan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada Tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp.101.040.000,-, pada APBD Murni.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan pedesaan ikut dirasionalisasi. Jumlah anggaran semula pada APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 101.040.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 76.866.000,-, namun tidak mempengaruhi capaian target pembentukan kawasan tersebut sebanyak 5 kawasan, karena pada tahun 2016 sudah terbentuk sebanyak 5 kawasan atau mencapai target. Oleh karena itu terdapat efisiensi sebesar 76,07 % dari anggaran semula yaitu sebesar Rp. 101.040.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah fasilitasi bantuan keuangan kawasan pedesaan untuk 22 desa penyangga kawasan sebesar Rp.1.000.000.000,- dari APBD Kabupaten dan Rp. 250.000.000,- bantuan keuangan APBD Provinsi.sesuai dengan usulan dalam proposal

yang diajukan antara lain digunakan untuk pembelian produk dari petani gula semut, pembelian complong pandan dari pengrajin, pembelian dan pengembangan sapi, pengembangan produk batik printing serta pengembangan sarana dan prasarana wisata desa.

Selanjutnya pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan sebesar Rp.153.864.000,- antara lain direncanakan untuk pendampingan dan evaluasi kawasan termasuk fasilitasi bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 400.000.000,-,

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 6% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp. 388.644.285.520 ,-. Angka realisasi Tahun 2021 mencapai Rp. 488.529.005.110,- atau dengan kata lain memperlihatkan realisasi 25,66% atau capaian kinerja 124,63% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2021 lebih tinggi. Hal ini menggambarkan Investasi di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan

Peran nyata/ upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 dalam mencapai target disebabkan oleh :

1. Mempermudah proses perizinan melalui penyelenggaraan MPP yang mewadahi pelayanan publik secara umum;
2. Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen (Siperi);
3. Merespon pesatnya minat pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudan berusaha;
4. Menerapkan layanan dan aktivitas pengendalian penanaman modal sesuai ketentuan new normal covid 19;

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak mengalami hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adanya kelambatan di Triwulan II dan Triwulan III

dikarenakan kegiatan usaha di masa pandemi Covid 2019 Kabupaten Kebumen PPKM level IV.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah

1. Fokus pada pendekatan atau fasilitasi proyek investasi yang relative besar yang terhambat atau terhenti .
2. Penyusunan peraturan daerah sesuai amanah UU Cipta Kerja
3. Perlunya membentuk gugus tugas (task force) pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah guna menyelesaikan masalah investasi secara komprehensif;
4. Penyusunan RUPM 2025 s/d 2040

Upaya yang dilakukan pada tahun 2022:

1. Melakukan Inovasi pelaksanaan promosi potensi investasi baik skala local, regional, nasional bahkan internasional.
2. Percepatan penyelesaian peraturan yang diperlukan untuk kemudahan penanaman modal di antaranya penyusunan perbub tata cara pemberian insentif penanaman modal, pembaharuan SOP layanan perizinan, pembaharuan SOP pengaduan dan konsultasi.

Pada tahun 2021 indikator ini didukung oleh Program :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal anggaran
2. Program Promosi Penanam Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota

Program kegiatan dilaksanakan secara efisien adapun faktor yang mempengaruhi dikarenakan tingginya respon pelaku usaha.

16. Persentase peningkatan kunjungan wisata

Berdasarkan data realisasi kunjungan wisata disimpulkan bahwa capaian kinerja Presentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 66,94% atau kriteria capaian kinerja Baik.

Pada tahun 2015 data kunjungan yang dihitung hanya dari kunjungan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 data kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah daerah

(swasta/ desa-desa wisata). Karena Pemerintah Daerah mulai tahun 2016 telah melakukan intervensi/ pembinaan ke pengelola obyek wisata diluar yang dikelola Obyek wisata Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan wisata kepada pokdarwis/ stakeholder pariwisata, membantu sarana dan prasana pariwisata dengan anggaran bantuan keuangan pariwisata ke beberapa obyek wisata desa. Sehingga tahun 2021 ada peningkatan kunjungan sebesar 13,18% , namun pada tahun 2020 terdapat penurunan kunjungan wisatawan, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid19 yang memang harus memaksa Pemerintah Daerah untuk menutup lokasi obyek wisatanya dan juga banyak dilakukan pembatasan pembatasan aktivitas.

Pemerintah daerah juga berusaha membantu masyarakat membangun wisata mandiri yakni dalam bentuk pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan yang mau dibangun oleh masyarakat. Pemerintah daerah berusaha menciptakan multipliereffect dari usaha pariwisata yang dibangun masyarakat, dan tujuannya agar pengunjung akan datang kembali ke Kabupaten Kebumen karena banyaknya obyek wisata pilihan.

Dalam usahanya pada tahun 2021 Pemerintah melaksanakan Recofusing anggaran untuk pemulihan Pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir diseluruh dunia.

Dalam membangun pariwisata membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun dilihat dari postur anggaran tersebut dirasa masih kurang, apalagi adanya pemdemi Covid19 yang memaksa Pemerintah Daerah melakukan recofusing anggaran untuk penanganan Covid19.

Hampir semua sektor usaha jasa pariwisata mengalami penurunan target yg cukup signifikan karena pandemi Covid19. Lama tinggal wisatawan nusantara atau domestik di tempat wisata pada tahun 2016 rata-rata 0,41 hari, tahun 2017 menjadi 0,51 hari, tahun 2018 menjadi 0,57 hari dan di tahun 2019 sebesar 1,03 hari, dan tahun 2020 mengalami penurunan hanya mencapai 0,32 hari dan di tahun 2021 ada kenaikan 1,37 hari (perhitungan dari hotel berbintang dikab. Kebumen yakni Hotel Mexolie dan GrandKolopaking), peningkatan ini karena adanya mulai dibukanya usaha jasa pariwisata yang diakibatkan oleh Pandemi Covid19, meskipun masih terbatas untuk menerima tamu.

17. Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah. Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) dibagi 3.

Capaian kinerja pelayanan infrastruktur wilayah dari target 62,88% di tahun 2021 berhasil realisasi sebesar 78,58% sehingga capaian presentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sebesar 124,97% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Adapun uraian dari masing-masing indikator pendukung sebagai berikut :

a. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah 960,358 kilometer, sedangkan jalan dalam kondisi baik / mantap tahun 2021 adalah sebesar 702,591 kilometer atau capaian sebesar 78,27%.

b. Ketersediaan Jaringan Irigasi

Panjang saluran irigasi skunder yang menjadi kewenangan kabupaten kebumen yaitu 184.418 m dengan luas sasaran daerah irigasi 8.621 Ha. Adapun realisasi kinerja terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 yaitu 75,17 %, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 73,3 %.

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten kebumen masih disalurkan oleh PDAM, SPAM Perdesaan dan Sumber Air Lainnya, Namun dalam Penghitiungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga, hanya memperhitungkan saluran perpipaan.

Cakupan Air bersih perpipaan yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 385.618 sambungan rumah dengan jumlah seluruh rumah tangga 468.548 rumah tangga atau capaian kinerja sebesar 82,31 %. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan sumber mata air dan pengelola

(kelompok pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat.

Adapun faktor pendukung dalam pencapaian target Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah adalah:

1. Komitmen Pemerintah Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi
3. Perbaikan kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 target sebesar 74,01 realisasi mencapai 71,18 dengan prosentase capaian sebesar 96,17 % atau kategori capaian kinerja Baik.

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

19. Angka Kemiskinan

Capaian kinerja untuk angka kemiskinan tahun 2021 sebagaimana tabel di atas mencapai 94,18% atau kategori capaian Baik. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan perlu bekerja keras dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021.

Selama kurun 2016-2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dari 19,89% menjadi 17,83%. Pada tahun 2016-2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen masih berada di atas nasional dan provinsi. Secara umum, pencapaian angka kemiskinan tahun 2019 sudah mampu mencapai target RPJMD Kabupaten Kebumen, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15,45% membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholders melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin kenaikan dari 10,8% pada tahun 2019 menjadi 11,79 % pada tahun 2021. Sedangkan ditingkat nasional persentase penduduk miskin turun dari 9,41% pada tahun 2019 menjadi 9,71% pada tahun 2021. Angka kemiskinan naik baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional hal ini dikarenakan dampak adanya pandemi covid-19.

Adapun prioritas untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;

4. Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan
6. Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.
7. pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, petani dan kegiatan ekonomi lainnya .

20. Angka pengangguran

Pada tahun 2021 Realisasi Kinerja Angka Pengangguran sebesar 6,03 % atau belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 96,03% atau kategori capaian kinerja Baik. Apabila dibandingkan data Angka Pengangguran dari BPS, angka pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen tahun 2021 mencapai 6,03%. Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2021 antara lain;

- 1) Optimalisasi penyebaran informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media yang dimiliki disnaker(Website, Facebook, Instagram,
- 2) Job canvassing (mencari informasi lowongan pekerjaan dan upaya memasarkan tenaga kerja) kepada Perusahaan baik tingkat lokal maupun nasional agar mau merekrut tenaga kerja dari Kabupaten.Kebumen
- 3) Memaksimalkan bursa kerja khusus yang ada di SMK/SMA untuk memberikan informasi penempatan kerja aluminya dan secara rutin Dinas meminta laporan penempatan perbulan.
- 4) Memfasilitasi tempat seleksi di kabupaten kebumen bagi perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja (tempat seleksi di aula disnaker)
- 5) Menjalin kerjasama/ kemitraan dengan stakeholder ketenakerjaan sehingga tahun 2021

Keberhasilan/ ketidak berhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target:

1. Minimnya Lapangan Kerja di Kabupaten Kebumen.
2. Tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja .
3. jumlah pencari kerja yang hanya berfokus pada sektor tertentu
4. Pandemi Covid 19 banyak Negara belum dibuka.
5. masih ada perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota,

Solusi dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kebumen
 2. Memperluas lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan diperluas dengan menumbuhkan potensi wirausahawan yang ada didaerah daerah contohnya dengan UMKM. Dukungan terhadap UMKM dapat diwujudkan dengan cara bantuan modal usaha, diadakan pameran UMKM dan bantuan promosi hasil UMKM.
 3. Meningkatkan upah
 4. Menjalin kerjasama dengan Bursa Perusahaan untuk meningkatkan jumlah kualitas pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri.
 5. Perluasan kesempatan kerja dengan membuka sebesar-besarnya wirausaha baru melalui kegiatan tenaga kerja mandiri diwilayah di desa-desa
21. Persentase Gedung Sekolah dalam Kondisi Baik

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 103,23% atau kategori capaian Baik Sekali. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 ada peningkatan 1,29%. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2021, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 39 sekolah (36 SD dan 3 MI), rehab gedung SMP/MTs di 28 sekolah (23 SMP dan 5 MTs) dan rehab 8 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

22. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan

Realisasi Indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan pada tahun 2021 mencapai 100% atau tingkat capaian kinerja 101% kategori Sangat Baik, hal ini tidak lain karena adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa indikator semua puskesmas sudah tersedia obat minimal 40 item obat dan 5 item vaksin yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan kadang terkendala karena stok obat di Gudang Farmasi menipis karena adanya pandemi covid-19 berakibat pada pengiriman paket pembelian obat tertunda namun demikian Puskesmas masih bisa mencukupi ketersediaan obat dengan dana BLUD masing-masing Puskesmas.

Solusi melakukan pemantauan dan pendampingan pada seluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan koordinasi dengan Pusat dan Propinsi terkait ketersediaan alokasi obat, meningkatkan kualitas Sumber daya kesehatan dengan mengirim pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan, rutin mengusulkan dana alokasi khusus untuk kegiatan akreditasi Puskesmas sehingga manajemen mutu pelayanan menjadi semakin meningkat

23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai

EKPPD tahun 2020 didasarkan pada Nilai EKPPD tahun 2018 sebagaimana Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020 dengan nilai 3,3226 atau tercapai dengan realisasi sebesar 110,75% atau dengan capaian kinerja kategori Sangat Baik.

Adapun beberapa hal yang sangat menghambat dalam pencapaian target adalah:

1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mencermati dan mengevaluasi data kinerja OPD.
2. Kemampuan personil yang ditunjuk dalam penyusunan LPPD masih rendah.
3. Tidak adanya evaluasi mandiri OPD atas capaian kinerja yang dijadikan sebagai kelengkapan capaian kinerja daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai EKPPD pada tahun mendatang adalah dengan :

1. Intensifitas koordinasi dengan Kementrian dalam negeri dalam pemahaman juknis penyusunan dan perhitungan indicator kinerja;
2. Dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah terkait kelengkapan dokumen LPPD
3. Dengan OPD se Kabupaten Kebumen terkait kecepatan, ketepatan dan aktualisasi data dukung capaian kinerja.
4. Bimbingan teknis penyusunan LPPD dengan menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri.
5. Desk to desk secara langsung terhadap data dukung yang dihimpun oleh OPD

24. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB.

Dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen 2021 belum keluar maka nilai masih berdasarkan nilai pada tahun 2020, dengan realisasi penilaian 63,84 yaitu capaian kinerja sebesar 106,4 % dengan kategori Sangat Baik.

Adapun rekomendasi LHE SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra Perangkat daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja;

- b. Melakukan integrasi aplikasi sim perencanaan, sim KUA PPAS, SIMDA Keuangan yang telah ada dengan aplikasi e-sakip sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja;
- c. Memanfaatkan cascading kinerja dalam menyusun perjanjian kinerja pada tingkat penanggungjawab program dan kegiatan serta melakukan casecading kinerja organisasi setiap perangkat daerah hingga pada level individu;
- d. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi AKIP dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, BAP3DA dan Bagian Organisasi Setda Kebumen; dan
- f. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Solusi atas hasil rekomendasi LHE SAKIP adalah terhadap RPJMD sudah tidak bisa dilakukan perubahan sehingga difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target untuk didorong capaian kinerjanya, menyusun Casecading yang difasilitasi oleh BAP3DA sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai dokumen Casecading, pelaksanaan Paparan Capaian IKU Bupati Kebumen Tahun 2019 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 oleh Kepala Perangkat Daerah dihadapan Bapak Bupati sehingga diharapkan dapat meningkatkan implementasi AKIP dan Kinerja, Inspektorat menginisiasi Pemberantasan Korupsi dengan mengajukan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan Setda, Inspektorat, BKPPD dan DPMPTSP) sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kemenpan RB serta Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal integrasi sistem perencanaan sampai dengan pelaporan masih pada tahap proses pembangunan sistem.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyerapan anggaran tidak sepenuhnya karena adanya efisiensi dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik (e-Letter) sehingga mengurangi biaya/belanja perjalanan, belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan dikarenakan berkurangnya intensitas undangan keluar daerah dan honor Narasumber tidak terealisasi secara maksimal karena merupakan sisa dari penyediaan dari yang kami rencanakan, karena narasumber yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan yaitu Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggungjawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua Perangkat Daerah mendiskripsikan dengan jelas usaha/upaya, kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu update aplikasi e-sakip.kebumenkab.go.id sehingga diharapkan nanti semua dokumen SAKIP diupload oleh semua perangkat daerah dan dipublikasikan untuk umum.

25. Opini BPK atas LKPD

Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik. Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2021 antara lain Reviu RKA Tahun 2020, Reviu BLUD tahun 2020, Reviu SSH, pendampingan penyusunan anggaran penanganan covid-19, pendampingan pengadaan barang/jasa di beberapa OPD, monitoring realisasi anggaran, probity audit, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan BPK tahun 2020, melakukan pengawasan pelaksanaan vaksin.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antarlain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Jumlah ideal ASN Inspektorat adalah 91 orang, namun baru tersedia 45 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor, karena dari jumlah ideal yang direkomendasikan BPKP sebanyak 62 Auditor, baru terdapat 17 Auditor dan 8 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
2. Belum tercukupinya kebutuhan anggaran Inspektorat, dari kebutuhan ideal 0,5% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021) dari belanja APBD atau minimal Rp.15 miliar, baru tersedia Rp.8.723.757.000 atau 48%.
3. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 10 orang dan 1 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat dari jumlah 25 orang APIP. Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi Atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah diperlukan langkah-langkah perbaikan, dengan mengusulkan tambahan SDM dan alokasi anggaran, sehingga Inspektorat dapat berperan dengan baik sebagai penjamin mutu (assurance activities), pemberi peringatan dini (anti corruption activities) dan pemelihara tata kelola pemerintahan (advisory activities).

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Pada sasaran ini pencapaian indikator sasaran belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 atau capaian kinerja 27,77 % dengan kriteria capaian kinerja Kurang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi tahun 2021 lebih rendah. hal ini dikarenakan :

1. Belum ada keharusan penyaluran zakat melalui BAZNAS
2. Adanya perubahan sistem pembayaran zakat melalui pemotongan gaji menjadi auto debet melalui bank Jateng
3. Banyaknya Lembaga pengumpul Zakat di Kabupaten Kebumen

Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2021 antara lain;

1. Sosialisasi Zakat kepada UPZ / OPD, BUMD dan Lembaga Pendidikan untuk menyalurkan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Melaksanakan koordinasi dengan bank Jateng untuk mempermudah proses auto debet bagi ASN yang akan menyalurkan Zakat.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2021 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Kebumen yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Kurang Mampu (BKM). Selain itu, keberhasilan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk berusia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Indikator ini didukung melalui program dan kegiatan peningkatan Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga

Untuk meningkatkan pengembangan pada bidang kepemudaan dan olahraga memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Capaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas-fasilitas untuk berlatih yang memadai dan juga kesejahteraan para atlet. Pemberian tali asih kepada atlet dikandung maksud untuk meningkatkan semangat atlet dalam bertanding. Peningkatan jumlah anggaran untuk bidang kepemudaan dan olahraga sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian prestasi pemuda dan olahraga.

5. Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2021 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar. Rp. 110.881.875.437,-

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 10,21 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

6. Angka Kematian Ibu

Pada tahun 2021 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar. Rp. 110.881.875.437,-

7. Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2021 indikator Angka Kematian Bayi didukung oleh beberapa Program antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 123.601.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.881.875.437,- . Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 10,21 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif yaitu : menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang HIV-AIDS pada guru Bimbingan konseling dan penyuluh agama, sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan remaja, Pelatihan kepada pendamping ODHA, pelatihan tentang kesehatan pada OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA), penyusunan buku panduan Warga Peduli AIDS (WPA), Sosialisasi buku panduan WPA kepada pendamping Desa, pemberian bantuan dan pelatihan kepada ODHA, program pencegahan HIV AIDS melalui transmisi seksual pada hotspot, pelatihan pengorganisasian Warga Peduli AIDS dan Komunikasi yang intensif antar Kementerian Agama, FKUB, MUI dan Kepolisian.

10. Penurunan kasus pelanggaran hukum

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 yaitu kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Kegiatan ini adalah operasi gangguan Tibum yang mengedepankan upaya preventif dengan sanksi berupa pembinaan ditempat, teguran, dan pemberian Surat Peringatan I, II, III secara berjenjang tergantung tingkat kepatuhan si pelanggar. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini berupa sosialisasi/penyuluhan/pembinaan perda dan atau perkara untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkara. Upaya preventif pelanggar perda selalu dikedepankan namun demikian tindakan tegas pro justisi juga perlu ditegakkan. Melalui kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati para pelanggar perda yang telah melampaui Surat Peringatan III dan masih melakukan pelanggaran akan dihadapkan di meja persidangan. Tindakan hukum yang tegas diharapkan akan memberi efek jera demi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

11. Pertumbuhan ekonomi

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya melalui penghijauan di wilayah mata air, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah baik rumah tangga maupun industri, peningkatan pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), penggunaan LPJU dan rambu lalu lintas solar cell dan pengembangan pertanian organik sebagai potensi unggulan daerah.

12. Pendapatan perkapita penduduk

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga

konstan (ADHK). PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi mobil dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Tahun 2021 untuk mendukung ketercapaian indikator ini pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi yang dilaksanakan seluruh OPD.

13. Rasio/ Indeks Gini

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menyasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

Pendampingan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada Tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp.101.040.000,-, pada APBD Murni.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Jumlah anggaran semula pada APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 101.040.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2021 menjadi Rp. 76.866.000,-, namun tidak mempengaruhi capaian target pembentukan kawasan tersebut sebanyak 5 kawasan, karena pada tahun 2016 sudah terbentuk sebanyak 5 kawasan atau mencapai target. Oleh karena itu terdapat efisiensi sebesar 76,07 % dari anggaran semula yaitu sebesar Rp. 101.040.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah fasilitasi bantuan keuangan kawasan perdesaan untuk 22 desa penyangga kawasan sebesar Rp.1.000.000.000,- dari APBD Kabupaten dan Rp. 250.000.000,- bantuan keuangan APBD Provinsi.sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan antara lain digunakan untuk pembelian produk dari petani gula semut, pembelian complong pandan dari pengrajin, pembelian dan pengembangan sapi, pengembangan produk batik printing serta pengembangan sarana dan prasarana wisata desa.

Selanjutnya pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan sebesar Rp.153.864.000,- antara lain direncanakan untuk pendampingan dan evaluasi kawasan termasuk fasilitasi bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 400.000.000,-

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN

Pada tahun 2021 indikator ini didukung oleh beberapa program diantaranya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal anggaran , Program Promosi Penanam Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota.

Program kegiatan dilaksanakan secara efisien adapun faktor yang mempengaruhi dikarenakan tingginya respon pelaku usaha.

16. Persentase peningkatan kunjungan wisata

Indikator ini didukung dengan Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam membangun pariwisata membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun dilihat dari postur anggaran tersebut dirasa masih kurang, apalagi adanya pemdemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Daerah melakukan recofusing anggaran untuk penanganan Covid19.

17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Jalan & Jembatan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya. Adapaun program yang tidak mencapai target adalah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Faktor yang menjadi penyebab adalah :

- 1.Masih terdapat lebar Jalan Kabupaten yang belum standar dan lebar RMJ kurang memenuhi kebutuhan lebar jalan standar
- 2.Sebagian besar Jalan Kabupaten terdapat di daerah pegunungan, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih kompleks
- 3.Jalan Kabupaten dilalui Kendaraan ODOL sehingga mengurangi umur ekonomi
- 4.Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang masuk dalam daerah rawan bencana dan berdampak pada infrastruktur.

faktor pendukung dalam pencapaian target Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya Komitmen Pemerintah Daerah, Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan insfrastruktur jalan dan irigasi, Perbaikan kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang bekaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) adalah untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

19. Angka Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas prioritas/unggulan, antara lain:

1. Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;
4. Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan
6. Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.
7. pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, petani dan kegiatan ekonomi lainnya .

20. Angka Pengangguran

Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2021 antara lain;

- 1) Optimalisasi penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media yang dipunyai disnaker(Website, Facebook, Instragram,
- 2) Job canvassing (mencari informasi lowongan pekerjaan dan upaya memasarkan tenaga kerja) kepada Perusahaan baik tingkat lokal maupun nasional agar mau merekrut tenaga kerja dari Kabupaten.Kebumen
- 3) Memaksimalkan bursa kerja khusus yang ada di SMK/SMA untuk memberikan informasi penempatan kerja aluminya dan secara rutin Dinas meminta laporan penempatan perbulan.
- 4) Memfasilitasi tempat seleksi di kabupaten kebumen bagi perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja .(tempat seleksi diaula disnaker)
- 5) Menjalin kerjasama/ kemitraan dengan stakholder ketenakerjaan sehingga tahun 2021

21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2021, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 39 sekolah (36 SD dan 3 MI), rehab gedung SMP/MTs di 28 sekolah (23 SMP dan 5 MTs) dan rehab 8 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan

Program pendukung atas indikator ini karena adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa indikator semua

puskesmas sudah tersedia obat minimal 40 item obat dan 5 item vaksin yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

24. Nilai akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

25. Opini BPK atas LKPD

Indikator ini didukung oleh Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Pada tahun 2021 indikator didukung oleh Program Hibah kepada BAZNAS Kebumen yang diwujudkan dengan kegiatan sosialisasi kepada ASN dan pentasyarufan zakat kepada masyarakat.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Efisiensi program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja daerah perlu dicermati dan dievaluasi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah –rendahnya.

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Rumus pengukuran persentase efisiensi biaya didapatkan dari 100% dikurangi Persen capaian Realisasi anggaran belanja dibagi dengan target anggaran belanja. Adapun gambaran efisiensi anggaran dalam mendukung capaian kinerja daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dengan capaian kategori interpretasi Tinggi, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal, terdapat efisiensi anggaran sebesar **8,96%**. Hal ini dapat dilihat dari total pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai kinerja utama Kabupaten Kebumen sebesar Rp. **1.837.301.249.000,-** dengan realisasi Rp. **1.672.744.194.708,-** atau penyerapan anggaran sebesar **91,04%**.

Tabel 2. 9 Analisis Efisiensi Anggaran Yang Mendukung IKU

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	168.420.894.000	159.676.714.174	90,84%	9,16%
2	Program Pembinaan Perpustakaan	849.815.000	839.893.348	98,83%	1,17%
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.866.547.000	1.487.906.173	79,71%	20,29%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	501.172.000	432.941.961	86,39%	13,61%
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	457.940.351.000	409.413.748.557	90,84%	9,16%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	559.010.000	546.068.000	97,68%	2,32%
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	473015000	328078400	69,36%	30,64%
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	501.172.000	432.941.961	86,39%	13,61%
9	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.957.284.000	3.916.130.007	98,96%	1,04%
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	251.303.000	228.924.600	91,10%	8,90%
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	217.766.000	217.713.498	99,98%	0,02%
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	473.015.000	328.078.400	69,36%	30,64%
13	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	102.082.000	99.438.464	97,41%	2,59%
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	44.204.000	14.578.150	32,98%	67,02%
15	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	599.338.000	590.077.600	98,45%	1,55%
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.522.592.000	1.484.125.728	97,47%	2,53%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
17	Program Penyuluhan Pertanian	3.595.884.000	3.508.588.105	97,57%	2,43%
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.522.592.000	1.484.125.728	97,47%	2,53%
19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	893.536.000	751.845.280	84,14%	15,86%
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.995.785.000	4.663.049.374	93,34%	6,66%
21	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.167.629.000	2.048.133.343	94,49%	5,51%
22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.487.385.000	1.460.856.368	98,22%	1,78%
23	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.279.023.000	1.193.538.408	93,32%	6,68%
24	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.167.629.000	2.048.133.343	94,49%	5,51%
25	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.393.535.000	1.293.559.474	92,83%	7,17%
26	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	91.726.000	80.929.400	88,23%	11,77%
27	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	996.193.000	989.791.976	99,36%	0,64%
28	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	1.830.676.000	1.101.235.495	60,15%	39,85%
29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.903.363.000	3.834.605.864	93,34%	6,66%
30	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	263.016.000	238.967.400	90,86%	9,14%
31	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	180.768.000	170.148.273	94,13%	5,87%
32	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	149.504.000	138.829.826	92,86%	7,14%
33	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.903.363.000	3.834.605.864	98,24%	1,76%
34	Program Pemasaran Pariwisata	970.618.000	893.060.400	92,01%	7,99%
35	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45.412.000	42.470.196	93,52%	6,48%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
36	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.024.946.000	2.893.473.532	95,65%	4,35%
37	Program Pengembangan Kebudayaan	510.132.000	422.018.022	82,73%	17,27%
38	Program Penyelenggaraan Jalan	81.585.015.000	72.590.485.160	88,98%	11,02%
39	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.299.353.000	11.921.794.469	96,93%	3,07%
40	Program Penataan Bangunan Gedung	3.918.884.000	3.741.793.170	95,48%	4,52%
41	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.232.999.000	5.968.900.717	95,76%	4,24%
42	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.573.276.000	18.611.208.485	95,08%	4,92%
43	Program Penyelenggaraan jalan	81.585.015.000	72.590.485.160	88,98%	11,02%
44	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.504.082.000	6.356.938.660	97,74%	2,26%
45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.573.276.000	18.611.208.485	95,08%	4,92%
46	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.842.178.000	9.124.808.866	92,71%	7,29%
47	Program Aplikasi Informatika	4.506.175.000	4.311.414.601	95,08%	4,92%
48	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.095.866.000	2.000.207.943	95,44%	4,56%
49	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	688.715.000	494.056.328	71,74%	28,26%
50	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	2.800.638.000	2.695.681.147	96,25%	3,75%
51	Program Kawasan Permukiman	954.280.000	942.570.813	98,77%	1,23%
52	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	8.912.903.000	8.572.869.533	96,18%	3,82%
53	Program Penanggulangan Bencana	6.959.433.000	6.637.579.802	95,38%	4,62%
54	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.171.594.000	2.144.987.404	98,77%	1,23%
55	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	35.609.000	34.629.300	97,25%	2,75%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
56	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.171.594.000	2.144.987.404	98,77%	1,23%
57	Program Perencanaan lingkungan hidup	115.296.000	114.665.539	99,45%	0,55%
58	Program Penanggulangan Bencana	6.959.433.000	6.637.579.802	95,38%	4,62%
59	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.630.172.000	1.587.456.245	97,38%	2,62%
60	Program Pengembangan Perumahan	33.386.000	32.629.720	97,73%	2,27%
61	Program Pemberdayaan Sosial	346.559.000	232.592.653	67,11%	32,89%
62	Program Rehabilitasi Sosial	716.244.000	679.403.549	94,86%	5,14%
63	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	164.140.000	4.996.000	3,04%	96,96%
64	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.576.273.000	9.672.108.753	91,45%	8,55%
65	Program PengarusUtamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	167.063.000	158.946.302	95,14%	4,86%
66	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.849.000	4.838.500	82,72%	17,28%
67	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	712.724.000	683.709.532	95,93%	4,07%
68	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.321.004.000	5.888.191.618	93,15%	6,85%
69	Program PengarusUtamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	167.063.000	158.946.302	95,14%	4,86%
70	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.321.004.000	5.888.191.618	93,15%	6,85%
71	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.727.107.000	1.532.682.098	88,74%	11,26%
72	Program Hubungan Industrial	140.216.000	121.854.300	86,90%	13,10%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
73	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.694.392.000	3.589.185.020	97,15%	2,85%
74	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	164.140.000	4.996.000	3,04%	96,96%
75	Program Pengelolaan Pendidikan	168.420.894.000	159.676.714.174	94,81%	5,19%
76	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	530.085.000	467.540.599	88,20%	11,80%
77	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	457.940.351.000	409.413.748.557	89,40%	10,60%
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.834.758.000	1.587.976.079	86,55%	13,45%
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	170.184.944.000	158.493.090.851	93,13%	6,87%
80	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	86.616.000	80.703.000	93,17%	6,83%
81	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	435.957.000	407.919.441	93,57%	6,43%
82	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	911.591.000	860.305.553	94,37%	5,63%
83	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.053.080.000	3.944.775.905	97,33%	2,67%
84	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	15.715.202.000	9.402.505.237	59,83%	40,17%
85	Program Kepegawaian Daerah	1.796.293.000	1.400.371.612	77,96%	22,04%
86	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.053.080.000	3.944.775.905	97,33%	2,67%
87	Program Kepegawaian Daerah	1.796.293.000	1.400.371.612	77,96%	22,04%
88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.005.452.000	847.443.308	84,28%	15,72%
89	Program Pengelolaan Arsip	464.492.000	460.302.513	99,10%	0,90%
90	Program Pencatatan Sipil	256.070.000	255.803.725	99,90%	0,10%
91	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.204.878.000	1.188.832.445	98,67%	1,33%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
92	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	659.281.000	655.769.100	99,47%	0,53%
93	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	996.193.000	989.791.976	99,36%	0,64%
94	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.321.004.000	5.888.191.618	93,15%	6,85%
95	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	259.923.000	239.265.838	92,05%	7,95%
96	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.321.004.000	5.888.191.618	93,15%	6,85%
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.174.516.000	3.035.991.028	95,64%	4,36%
98	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	435.957.000	407.919.441	93,57%	6,43%
99	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.945.095.000	1.858.909.483	86,55%	13,45%
100	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	473.015.000	328.078.400	69,36%	30,64%
JUMLAH		1.837.301.249.000	1.672.744.194.708	91,04%	8,96%

Sumber : BPKAD Kab Kebumen 2021

Ket : Data Belum Audit

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

6.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah SP DIPA-090.02.4.039600/2021. Tugas Pembantuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.710.138.000,- (*sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) untuk pembangunan Pasar Dorowati di Desa Dorowati Kecamatan Klirong dan pembangunan Pasar Kejawang di Desa Kejawang Kecamatan Sruweng.

3.1.2. Realisasi

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 9.710.138.000,- terealisasi Rp. 9.643.114.663,- atau sebesar 99,31%.

Tabel 3. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementrian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2021	Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/R evitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen	9.710.138.000	9.643.114.663	99,31%	2	100%	

6.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1. Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan.

3.2.2. Realisasi

Tidak ada realisasi karena tidak terdapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

6.3. Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala.

6.4. Saran dan Tindaklanjuti

Tidak ada.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

10.1. Urusan Pendidikan

7.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

7.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini - Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di satuan pendidikan anak usia dini	100%
2	Pendidikan Dasar	a. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan Sekolah Dasar b. Jumlah Warga Negara usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar (SD/Mi) - Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan) Jumlah Warga Negara usia 12- 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada pendidikan sekolah menengah Pertama - Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET SPM
		Pertama		
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; - jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	100%

7.1.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN 2021	PERSEN TASE CAPAIAN
Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini - Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di satuan pendidikan anak usia dini	43.556	102%
				42.777	
2	Pendidikan Dasar	a. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar (SD/Mi) - Jml Penduduk (sesuai	133.645	101%
				132.026	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN
			Jenis Layanan)		
		b. Jumlah Warga Negara usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara usia 12- 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada pendidikan sekolah menengah Pertama	62.076	97%
			- Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	63.950	
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	630	100%
			- jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	630	

Sumber data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen Tahun 2021

7.1.4. Alokasi anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM sebesar Rp. 220.790.192.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.333.002.473,- atau sebesar 96%.

7.1.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Bupati Kebumen
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
- d. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
- e. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
- e. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 - 3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
 - 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
 - 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
 - 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
 - 10. Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

11. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
13. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

7.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Adanya penduduk berdomisili di luar Kebumen mengakibatkan berkurang jumlah anak usia sekolah 12-15 tahun yang belajar di Kabupaten Kebumen
2. Anak Putus Sekolah (Pernikahan di usia dini, bekerja dll)

b. Solusi

1. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, berkenaan dengan data individu penduduk pada rentang usia sekolah 12-15 tahun dan program pemenuhan pencapaian target SPM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan rogram pendidikan kesetaraan.

10.2. Urusan Kesehatan

7.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

7.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Kesehatan tahun 2021 di Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 3 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	100%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	100%
			Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kab tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	
6	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	
7	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase orang	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang - mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang - mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang - mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang - mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
			sama.	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. - Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang - mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100%

7.2.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN	REALISASI (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.872 18.879	99,9%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	18.823	99,7%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN	REALISASI (%)
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	18.879	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	18.490	98%
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.849	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	92.576	97,7%
			Jumlah Balita usia 12-59 bulan diwilayah kerja kab tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	94.678	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	132.614	81,9%
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	161.866	
7	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Penduduk usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	580.766	65,4%
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	888.051	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN	REALISASI (%)
6	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Penduduk usia lansia	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	150.261	84%
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	178.630	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	85.263	84%
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	101.499	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	11.818	99,2%
			Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	11.903	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.706	89,8%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	DATA CAPAIAN	REALISASI (%)
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4.123	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.	6.705	51,8%
			Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	12.923	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	22.282	100%
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	22.282	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, 2021

7.2.4. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan dengan Pagu sebesar Rp. 10.669.519.000,- dengan realisasi Rp. 7.678.221.034,- atau capaian 71,96%.

7.2.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari

2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah disebutkan diatas pada SPM Pendidikan.

7.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Kehamilan yang tidak diinginkan ibu hamil pendatang yang memeriksakan kehamilan di usia akhir kehamilan
2. Persalinan sebelum sampai fasilitas kesehatan dan adanya persalinan yang ditolong oleh dukun bayi
3. Adanya kematian bayi pada 6 jam pertama kelahiran
4. Pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 ;
5. Belum Optimalnya petugas kesehatan dan kader mampu melaksanakan deteksi tumbuh kembang secara standart
6. Kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19 ;
7. Jumlah sasaran sekolah tidak sebanding dengan petugas kesehatan yang melaksanakan screening
8. Adanya Pandemi Covid-19 utamanya pada tingginya kasus di pertengahan 2021 yang menyebabkan kegiatan posbindu sementara berhenti;
9. Anggaran BMHP gula darah belum mencukupi untuk seluruh usia produktif;
10. Terbatasnya SDM Puskesmas yang juga memegang program rangkap;
11. Kurangnya peran serta tokoh masyarakat (kecamatan dan desa) sehingga pelaksanaan posbindu belum optimal, masyarakat yang sehat enggan datang pada kegiatan skrining usia produktif
12. Terbatasnya sarana dan prasarana (Posbindu Kit dan Reagen);
13. Belum optimalnya pelaporan penderita HT utamanya dari dokter/klinik swasta;
14. ODGJ tidak tercapai karena pandemi Covid sehingga kegiatan terbatas, kurang optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan ODGJ, kurangnya kesadaran keluarga dalam pengobatan ODGJ, serta sebagian besar ODGJ berasal dari keluarga tidak mampu dan belum mempunyai BPJS;

15. Belum maksimalnya investigasi kontak penderita TBC; dan
16. Screening pada pondok pesantren, lapas belum maksimal.

b. Solusi

1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader dalam pelaksanaan SDIDTK;
2. Mengusulkan anggaran pengadaan strip gula darah dan posbindu kit melalui dana DAK;
3. Penentuan sasaran berdasarkan data riil penduduk dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran;
4. Penguatan kegiatan posbindu PTM dengan meningkatkan peran serta kader terlatih;
5. Peningkatan peran serta tokoh masyarakat dalam penggerakan masyarakat dalam kegiatan skrining usia produktif dan posbindu;
6. Integrasi kegiatan skrining usia produktif dengan kegiatan lain misalnya vaksinasi covid, posyandu remaja;
7. Meningkatkan gerakan skrining usia produktif pada kegiatan seperti arisan, pengajian, Posbindu mobile untuk menjangkau masyarakat yang sehat;
8. Penguatan pelaporan dengan peningkatan jejaring PTM utamanya klinik/dokter swasta;
9. Meningkatkan gerakan screening posbindu desa untuk menjadwalkan penderita DM;
10. Meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, balai pengobatan swasta;
11. Meningkatkan sosialisasi dan promosi kesehatan serta meningkatkan keterlibatan lintas sektor terkait;
12. Meningkatkan gerakan screening pada pondok pesantren dan lapas; dan
13. Meningkatkan kapasitas program TB.

10.3. Urusan Pekerjaan Umum

7.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten;
dan

2. Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.

7.3.2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Target pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Kumulatif Masyarakat/Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kabupaten	100
			Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah n Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	100
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	

7.3.3. Realisasi

Tabel 4. 6 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Kumulatif Masyarakat/Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kabupaten	385.618	82%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga	468.548	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah n Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	312.853	72%
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	436.301	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, 2021

7.3.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021 adalah Rp 24.218.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.565.463.790,- atau capaian sebesar 97,30%.

7.3.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Terbatasnya sumber mata air bersih;
2. Kondisi geografis kabupaten kebumen;

3. Sumber akses air minum belum layak;
4. Masih terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum layak; dan
5. Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal.

b. Solusi

1. Penyediaan SPAM regional bersama;
2. Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama;
3. Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala; dan
4. Lewat program DAK Sanitasi masyarakat akan membuat Tangki septik yang sesuai standar SNI

10.4. Urusan Perumahan Rakyat

7.4.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.

7.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 7 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
			jumlah warga negara korban bencana yang seharusnya memperoleh rumah layak huni	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Na
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	

4.4.1. Realisasi

Tabel 4. 8 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6	100%
			jumlah warga negara korban bencana yang seharusnya memperoleh rumah layak huni	6	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Na	0%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
	program Pemerintah Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Na	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

7.4.3. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah Rp 219.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp 219.290.000,- atau capaian sebesar 100%.

7.4.4. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7.4.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana

b. Solusi

1. Solusi dalam penyelesaian masalah tersebut yakni penanganan rumah korban bencana dilaksanakan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.

10.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

7.5.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

7.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 9 Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	jumlah warga yang melaporkan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana			
	a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana yang menjadi korban bencana	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah Jumlah kasus kebakaran di kabupaten	100%

7.5.3. Realisasi

Tabel 4. 10 Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	jumlah warga yang melaporkan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1 1	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana				
	a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	207.512 207.512	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		sesuai jenis ancaman bencana			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.930	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	b. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	244	100%
			Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana yang menjadi korban bencana	244	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	b. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah	255	100%
			Jumlah kasus kebakaran di kabupaten	255	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen, 2021

7.5.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Trantibum Tahun 2021 adalah Rp 9.133.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.745.618.774,- atau capaian sebesar 95,75%.

7.5.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan perda/perkada;
2. Banyaknya desa rawan bencana menyebabkan banyaknya peralatan EWS bencana dan papan rambu kebencanaan yang harus di pasang;
3. Banyaknya warga dan aparat yang belum di tingkatkan kapasitasnya akan kebencanaan;
4. Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana belum terkordinasi dengan baik; dan
5. Belum seluruh wilayah Kab Kebumen terjangkau respon time 15 menit.

b. Solusi

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong desa yang berada di daerah rawan bencana untuk memasang Papan Rambu kebencanaan dengan menggunakan anggota Desa;

3. Mendorong agar desa menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi warganya yang berada di daerah yang berrisiko terjadi bencana;
4. Memberikan fasilitasi bagi organisasi relawan untuk peningkatan kapasitas dan berkoordinasi sesama organisasi relawan; dan
5. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran.

10.6. Urusan Sosial

7.6.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

7.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 11 Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
			Jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah penyandang , anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
			Jlh populasi anak terlantar	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
			di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah populasi lanjut usia terlantar terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah populasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100%

7.6.3. Realisasi

Tabel 4. 12 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	903	100%
			Jlh. populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	903	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah penyandang , anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75	100%
			Jlh populasi anak terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	75	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	88	100%
			Jumlah populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	88	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	114	100%
			Jumlah populasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di daerah kabupaten / kota yang	114	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1049	100%
			Jumlah populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	1049	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

7.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mencapai SPM Sosial sebesar Rp. 2.354.585.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.097.674.669,- atau dengan capaian 89%

7.6.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan SPM penyandang SPM, penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus disabilitas mental);
2. Masih terhambatnya pemasaran produk hasil pelatihan;
3. Terkendala faktor permodalan;
4. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar tidak memiliki rumah layak huni, tidak memiliki anggota keluarga, diterlantarkan oleh keluarga dan tidak mampu mengurus dirinya;
5. Penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus untuk disabilitas mental)
6. Rendahnya akses lapangan kerja; dan
7. Rendahnya tingkat ketrampilan

b. Solusi

- a. Memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan;
- b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, desa, dan puskesmas saling memonitor;
- c. Mempromosikan produk hasil pelatihan;
- d. Mencarikan mitra usaha/pemberi modal;
- e. Dirujuk ke panti khusus lansia, permohonan bedah rumah (jika memiliki hak tanah), pemberian permakanan; dan
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pelatihan, peningkatan ketrampilan, bimbingan rohani/spiritual, pemeriksaan kesehatan rutin.

10.7. Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2021 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pendukung :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

2. Pendidikan Dasar dengan kegiatan pendukung :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

3. Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan pendukung :

- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

B. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d) Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

- e) Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f) Pelayanan Kesehatan Usia Lansia
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- g) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pelayanan Kesehatan Penderita DM
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pelayanan kesehatan terduga tuberculosi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

2. Program Kawasan Permukiman

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

D. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota
 - 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota

E. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Trantibum

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2. Program Penanggulangan Bencana
- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a) Kegiatan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

F. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a) Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat bantu
 - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2. Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom untuk menciptakan *clean governance* serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan program dan kegiatan di semua urusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2021.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini diharapkan akan menjadi titik tolak untuk mengarahkan cara pandang bagi perbaikan pembangunan di Kabupaten Kebumen kedepan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dituntut untuk bisa menjadi lebih baik khususnya dalam menjawab permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun LPPD ini di pandang bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka tetapi juga harus bisa menjadi semacam upaya moral agar penyelenggaraan pemerintah tetap memberikan perhatian lebih dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Kebumen menerima penghargaan tingkat Nasional diantaranya sebagai berikut :

1. Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
2. Penghargaan Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Kategori Utama diterima tahun 2021, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

3. Penghargaan *Smart City* atau Kota Cerdas 2021, merupakan penghargaan Smart City kategori Smart Governance
4. Juara 1 Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2021, adalah penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan anugerah kearsipan kepada pencipta arsip yang menjadi tiga besar capaian nilai hasil pengawasan kearsipan